

Deadlock Demokrasi Liberal dan Problem Representasi Politik di Indonesia

Sebuah Pendekatan Kritik Ideologi



Tim Peneliti:

Prof. Dr. Heru Nugroho

AB. Widyanta, MA.

Dana Hasibuan, MA.

Frans Vicky Djalong, MA.

Mustaghfiroh Rahayu, MA.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta

2015

KATA PENGANTAR

Penelitian berjudul "*Deadlock Demokrasi Liberal dan Problem Representasi Politik di Indonesia Sebuah Pendekatan Kritik Ideologi*" ini bermula dari keresehan penulis bersama tim peneliti di Departemen Sosiologi tentang proses demokratisasi di Indonesia selama hampir dua dekade. Dalam tataran tertentu, alih-alih menciptakan pembangunan inklusif (baca: demokrasi substantif) yang berimplikasi pada kesejahteraan warga, proses demokratisasi di Indonesia selama dua dekade ini justru merepresentasikan praktik-praktik demokrasi yang terfragmentasi, ambivalensi, paradoks, bahkan *deadlock*.

Melalui pelacakan praktik-praktik demokrasi di dua arena—wilayah pedesaan (*rural area*) dan wilayah perkotaan (*urban area*)— penelitian ini berupaya membigkai analisis dengan pendekatan kritik ideologi terhadap praktik demokrasi liberal yang semakin menunjukkan krisis representasi (tercermin di dalam prosedur *one man one vote*). Dalam bingkai kritik ideologi, penelitian ini mendapati sebuah kemendesakan untuk memulai menginterogasi lebih lanjut atas kebuntuan demokrasi liberal yang tidak merepresentasikan kepentingan kelompok-kelompok subaltern, hingga menawarkan cara pandang lain atas model praktik demokrasi yang lebih substansial.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tim peneliti, Dana Hasibuan, Frans Vicky Djalong, Mustagfiroh Rahayu, dan AB. Widyanta yang melalui kerja-kerja kolegal telah mengolaborasi pemikiran kritis ini untuk membedah persoalan praksis kehidupan politik demokrasi di Indonesia sehingga bisa mengkontribusikan pemikiran kritis/alternatif untuk perbaikan praktik demokrasi di negeri ini.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berkenan menjadi narasumber, seperti Komunitas Warga Berdaya, Miliran, Kotamadya, Yogyakarta; Komunitas Warga Resettlement Mandiri Desa Glagah Harjo, Sleman, Yogyakarta; Badan Lingkungan Hidup Kotamadya Yogyakarta; BPBD Provinsi Yogyakarta; dan DPRD Provinsi DIY. Semoga penelitian ini bisa berkontribusi bagi pengembangan model demokrasi yang lebih substansial di masa mendatang. []

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
Bab I Pendahuluan	
1.1 Pengantar	4
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metodologi Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
1.6 Kerangka Teori	7
Bab II Kontestasi Wacana Politik Representasi dan Demokrasi	
2.1. Pengantar	12
2.2 Studi Demokrasi dan Hegemoni Pengetahuan Barat	13
2.3 Kritik Ideologi Terhadap Wacana Politik Representasi dan Demokrasi	14
2.3.1 Pendekatan Post-Kolonial: Krisis Representasi dan Marjinalisasi Suara Kelompok Subaltern	15
2.3.2 Pendekatan Post-Marxist: Problem Representasi dan Hegemoni Demokrasi Liberal	17
2.4 Kesimpulan	20
Bab III Politik ‘Lokalitas’ dan Kebuntuan Representasi Liberal	
3.1 Pengantar	
3.2 Yogyakarta Untuk Siapa? Klaim Warga Atas Yogyakarta	21
3.2.1 Pembangunan Versi Neoliberalisme: ‘Yogyakarta- Kota Pariwisata’	21
3.2.2 ‘Warga Berdaya’: Kritik Terhadap Komodifikasi Kota	22
3.2.3 Praktek Representasi dan Dilema Gerakan ‘Warga Berdaya’	24
3.3 ‘Relokasi Mandiri’ dalam Politik Bencana	25
3.3.1 ‘Relokasi Mandiri’: Ruang Sosial di Luar Yurisdiksi Kekuasaan Negara	27
3.3.2 Praktek Representasi: Strategi Mendisiplinkan Warga	28
3.4 Kesimpulan	29
Bab IV Krisis Representasi dan Hegemoni Demokrasi Liberal	
4.1. Pengantar	31
4.2 Tantangan Praktek Representasi di Area Urban Yogyakarta	31
4.2.1 Pembatasan Otoritas Parlemen Dan Pembangunan Neoliberalisme	31
4.2.2 Birokrasi: Lembaga Representatif, Instansi Modernitas, atau Roda Kapitalisme?	33
4.3 Tantangan Praktek Representasi di Area Rural Yogyakarta	34
4.3.1 Limitasi Legitimasi Parlemen Dalam Mengadvokasi Isu Bencana	34
4.3.2 Reproduksi Kearifan Lokal ‘Sembada’ Dan Laissez-Faire Birokrasi	36
4.4 Kesimpulan	39
Bab V Kesimpulan	41

BAB I

Pendahuluan

1.1 Pengantar

Enam bulan pasca terpilihnya Jokowi sebagai presiden mulai menunjukkan perubahan antusiasme politik. Euforia tinggi di awal ketika Jokowi terpilih sebagai presiden karena dipandang mampu membawa perubahan besar mulai dipertanyakan kembali. Jokowi yang pada permulaannya merepresentasikan citra warga sipil yang jujur, kerja keras, dan bersih dari korupsi sampai hari ini belum menghasilkan problematisasi baru yang akhirnya membawa terobosan dalam formulasi kebijakan (Kompas, 2015). Pada beberapa isu lainnya, Jokowi juga menunjukkan ketidaksiapan dalam menyiapkan manuver politik dan akhirnya tersandera dalam konflik elit partai seperti yang tercermin dalam kasus pemilihan BG sebagai Kapolri.

Bertolak dari pamor Jokowi yang semakin 'meredup' meski di awal mendapat dukungan yang luas dari masyarakat sipil di awal mengindikasikan bahwa terdapat krisis representasi yang serius di Indonesia. Dalam prakteknya, fenomena ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional tetapi juga hingga ke tingkat lokal. Namun apa yang sebenarnya menyebabkan krisis representasi di dalam sistem demokrasi? Hingga saat ini tidak ada kesepakatan di antara tokoh-tokoh yang selama ini mempelajari perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia. Pandangan populer selama ini terbelah antara kelompok yang memandang bahwa Jokowi secara individu memang belum memiliki kapasitas untuk memimpin negara sebesar Indonesia melawan kelompok yang mencermati bahwa Jokowi tersandera perseteruan elite politik yang lebih luas. Berbeda dengan kedua sudut pandang diatas, studi ini tidak hendak melihat bahwa krisis representasi tidak terkait dengan kapasitas individu maupun pertarungan antar elite politik.

Studi ini berpendapat bahwa krisis representasi justru merupakan hal yang tak terelakkan demokrasi liberal yang selanjutnya rentan menciptakan situasi buntu atau *deadlock*. Lebih jauh, limitasi demokrasi liberal tidak hanya mereproduksi krisis representasi, tetapi juga marginalisasi identitas dan agensi kelompok kecil atau subaltern. Dengan kata lain, studi ini hendak memperluas kritik-kritik yang selama ini menganggap bahwa krisis representasi semata-mata disebabkan oleh sifat negatif individual, oligarki politik atau ego-sektoral diantara lembaga-lembaga negara. Melalui pendekatan kritik ideologi, studi ini hendak mengeksplorasi secara lebih mendalam krisis representasi dan relasinya dengan limitasi sistem demokrasi liberal sehingga hubungan antara elite atau dalam hal ini Jokowi dengan kelompok subaltern sebenarnya merupakan relasi yang semu.

Untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai krisis representasi di dalam demokrasi liberal, studi ini akan fokus pada kelompok subaltern. Meski setiap kelompok rentan untuk disenyapkan atau tidak dapat berbicara dalam model representasi dominan, wacana kelompok tertindas atau subaltern adalah wacana yang paling sering digunakan untuk membangun legitimasi elite atau kelompok yang merepresentasikan. Dan oleh karena itu, kelompok subaltern adalah kelompok yang

pertama kali mengalami dampak negatif dari limitasi proses representasi (Guha, 1983, hlm 6). Meski demikian, siapa yang dimaksud secara spesifik dengan kelompok subaltern sendiri merupakan konsep politik yang terus dikontestasikan. Di dalam studi ini, kelompok subaltern dipahami sebagai kelompok yang tidak hanya mengalami marginalisasi tetapi juga terus aktif membangun resistensi meski dalam skala kecil sekalipun (Chakrabarty, 2000)

Singkat kata, studi ini fokus mengeksplorasi limitasi cara kerja representasi dan demokrasi liberal bagi kelompok subaltern. Kedua, studi ini membuka kemungkinan-kemungkinan adanya perlawanan kelompok subaltern terhadap model representasi dominan di luar bentuk formal. Bentuk resistensi dapat berupa artikulasi budaya, bahasa, dan ekonomi alternatif.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari problematisasi atas konsep representasi liberal, penelitian ini hendak mengeksplorasi secara lebih dalam

(i) Seperti apa mekanisme representasi yang selama ini bekerja di dalam model demokrasi liberal? Bagaimana wacana representasi dan demokrasi liberal tersebut direproduksi di Indonesia?

(ii) Seperti apa manifestasi praktek dan mekanisme representasi liberal di dalam lembaga parlemen, eksekutif dan komunitas? Dan bagaimana limitasi model representasi tersebut berhubungan dengan marginalisasi suara kelompok subaltern?

(iii) Apakah ada upaya resistensi yang selama ini dikembangkan oleh kelompok subaltern? Jika ada, seperti apa bentuknya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pertama adalah untuk mengidentifikasi dan memetakan model representasi liberal yang dominan di dalam sistem demokrasi pasca orde baru. Termasuk di dalam tujuan ini adalah melacak genealogi model representasi yang dominan di Indonesia dan juga proses reproduksi makna representasi tersebut melalui berbagai elemen yang selama ini diyakini sebagai pilar demokrasi. Melalui identifikasi dan pemetaan terhadap model representasi liberal, dapat dihasilkan gambaran mengenai limitasi, keunggulan, dan alternatif atas model representasi liberal.

Kedua, penelitian ini hendak mengidentifikasi cara atau mekanisme kerja model representasi liberal untuk mengisi kelangkaan kajian kritik ideologi yang membahas problematik representasi dalam hubungannya dengan penguatan kapasitas emansipatoris demokrasi dan terbentuknya formasi intelektual organik. Ketiga, tujuan studi ini adalah untuk mengeksplorasi berbagai bentuk artikulasi resistensi di luar representasi politik formal. Dalam studi demokrasi politik (*Democracy Studies*), mayoritas literatur-literatur yang ada fokus mengkaji regulasi, mekanisme dan proses elektoral dan sedikit perhatian diberikan pada politik kewarganegaraan aktif. Termasuk di dalamnya, kemungkinan-kemungkinan bahwa resistensi mengambil bentuk di luar politik formal cenderung diabaikan. Akibatnya, alih-alih memanfaatkan potensi

resistensi yang sudah ada, advokasi kepentingan subaltern mengenai keadilan justru kian memperkokoh proses marjinalisasi.

Tiga tujuan diatas diharapkan dapat membawa pemahaman baru mengenai limitasi model representasi liberal serta mengkritik logika dominan yang mengisi representasi tersebut.

1.4 Metodologi Penelitian

Kerangka berpikir studi ini adalah kritik ideologi yang hendak membahas problematika model dan makna representasi dengan berkaca pada pengalaman kelompok subaltern selama ini di dalam sistem demokrasi. Alih-alih mengeksplorasi faktor-faktor individual dan struktural yang berkontribusi pada proses marjinalisasi terhadap kelompok subaltern, fokus penelitian ini adalah mengangkat bagaimana peminggiran terhadap kelompok subaltern terus direproduksi melalui wacana representasi.

Untuk mengeksplorasi lebih jauh reproduksi wacana representasi di dalam meminggirkan posisi kelompok subaltern, penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Etnografi menjadi preferensi utama di dalam penelitian ini karena mendorong sekaligus memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk terlibat secara aktif dan mendalam dengan kelompok dan lingkungan dimana penelitian dilakukan (Bryman, 2012). Keterlibatan secara aktif dengan informan meliputi wawancara yang mendalam dalam jangka waktu tertentu, mendeskripsikan setting dan latar belakang informan, dan mengumpulkan dokumen-dokumen mengenai informan yang relevan dengan fokus penelitian.

Oleh karena itu, di dalam mengoperasionalkan pendekatan etnografi, penelitian ini akan menggunakan dua metode utama yakni *in-depth interview* dan data sekunder. Data sekunder akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk dari pemberitaan media massa, laporan pemerintah, dan materi advokasi NGO. Sementara *in-depth interview* akan dilakukan melalui wawancara yang mendalam dengan kelompok subaltern yang selama ini dipinggirkan di dalam proses pembangunan dan demokrasi.

Di dalam penelitian ini, terdapat dua kelompok subaltern yang menjadi informan utama yakni kelompok masyarakat yang mengalami resettlement pasca erupsi Gunung Merapi dan gerakan masyarakat yang dikenal dengan nama *Jogja Assat*. Dua kelompok tersebut dipilih sebab di dalam konteks Yogyakarta hari ini, dua kelompok ini berada di posisi sosial yang rentan untuk dieksploitasi dan dipinggirkan sebagai dampak dari pembangunan dan bencana.

Kelompok resettlement Gunung Merapi praktis sejak tahun 2010 mengalami dislokasi baik secara ekonomi, politik, kebudayaan dan sosial pasca meletusnya Gunung Merapi. Hal ini tercermin dari relasi masyarakat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah Sleman yang mendorong masyarakat untuk meninggalkan kawasan pemukiman lama mereka karena tergolong sebagai kawasan rawan bencana. Akibatnya, pengetahuan dan tata kelola kehidupan masyarakat *resettlement* yang

selama ini memiliki hubungan erat (embedded) dengan alam sekitar menjadi tidak relevan lagi.

Kelompok kedua yang menjadi informan adalah gerakan masyarakat *Jogja Assat* yang aktif mengadvokasi isu lingkungan dan pembangunan di wilayah perkotaan Yogyakarta. Kemunculan *Jogja Assat* (*Assat* sendiri memiliki makna *kering*) sebagai suatu gerakan sosial tidak dapat dipisahkan dari transformasi pembangunan di Yogyakarta yang ditandai dengan pembangunan mal, apartemen dan *real estate* yang sangat signifikan dalam lima tahun terakhir.

Momentum gerakan *Jogja Assat* sendiri bermula ketika Fave hotel dibangun di daerah Miliran, Yogyakarta. Lokasi pembangunan Fave hotel yang dekat dengan pemukiman warga dipandang telah menimbulkan dampak negatif bagi keberlangsungan kehidupan warga dan lingkungan sekitar sebab sumber air tanah yang selama ini digunakan untuk menopang kehidupan masyarakat sekitar Miliran diklaim oleh Fave hotel untuk kebutuhan operasional hotel. Permasalahan menjadi semakin rumit sebab Fave hotel telah mengantongi izin membangun dari pemerintah daerah dan membawa bukti ilmiah dari beberapa ilmuwan UGM bahwa keberadaan hotel bukan faktor penyebab mengeringnya air di sekitar Miliran.

Studi etnografi atas warga negara yang mengalami resettlement di Merapi dan berpartisipasi di dalam gerakan *Jogja Assat* diharapkan dapat menghasilkan pemahaman-pemahaman baru di dalam mencermati dan mengkonseptualisasi model representasi, agensi dan formasi demokrasi di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Bertolak dari kerangka berpikir yang telah dirumuskan dari pertanyaan penelitian di atas, proses penelitian ini dapat diturunkan ke dalam lima bab. Isi dari Bab I adalah pendahuluan dan juga kerangka teori. Bab II mendeskripsikan model representasi liberal yang berkembang di Indonesia. Salah satu poin penting yang diangkat dalam bab II adalah melacak genealogi demokrasi di Indonesia dan mengidentifikasikan limitasi demokrasi liberal, termasuk di dalamnya krisis representasi. Selanjutnya Bab III membahas manifestasi praktek dan mekanisme representasi di parlemen, eksekutif dan komunitas serta formasi agensi warga yang terbentuk di dalam model representasi liberal tersebut. Bab IV kemudian mengkaji respon terhadap kebuntuan model representasi dan demokrasi liberal. Hal ini akan dilakukan dengan menganalisa temuan dari kelompok-kelompok subaltern mengenai pembangunan di Yogyakarta dan juga kepemimpinan di bawah era Jokowi, dua kasus yang mencerminkan keterbatasan mekanisme representasi. Hipotesa awal penelitian ini adalah gelombang kekecewaan terhadap representasi liberal semakin menguat. Terakhir, penelitian ini akan ditutup dengan Bab V yang memberikan catatan kritis.

1.6 Kerangka Teori

Ada tiga pendekatan yang selama ini mendominasi perdebatan mengenai krisis representasi dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan integritas/moralistik yang menekankan karakteristik-karakteristik

personal seperti kelihaihan elite-elite di dalam memimpin dan menavigasikan negara atau lembaga pemerintah, kemampuan mengelola dinamika politik melalui manuver-manuver, dan bahkan karisma individu (Magnis-Suseno, 2009). Pandangan tersebut dapat diperdebatkan sebagai pandangan yang menekankan aspek behaviorisme (perilaku) yang akhirnya membebankan seluruh persoalan kepada figur pemimpin. Melalui pendekatan ini, problem representasi dianggap berkorelasi dengan skill seorang *pemimpin*.

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan institusionalis yang melihat bahwa krisis representasi tidak dapat dipisahkan dari mekanisme yang mengatur relasi otoritas lembaga-lembaga negara. Demokrasi Indonesia saat ini yang secara umum dikategorikan sebagai demokrasi yang menganut sistem presidensialisme dan mengakui multi-partai rentan mengalami stagnansi, otoritas eksekutif yang lemah serta destabilisasi konflik hubungan eksekutif dan legislatif (Mainwaring, 1990 dalam Aspinal, Metzner, dan Tomsa, 2014, hlm 7).

Hal ini dikarenakan, presiden yang terpilih secara demokratis seringkali tidak memiliki perwakilan yang menguasai suara mayoritas di parlemen. Relasi timpang seperti ini menjadi jawaban 'jalan pintas' untuk menjelaskan mengapa seorang pemimpin populer tidak dapat membawa perubahan sebagaimana diharapkan. Termasuk juga di dalam pendekatan ini adalah argumen yang mengaitkan limitasi Jokowi dengan beban historis yang harus ia wariskan dari pendahulu-pendahulu sebelumnya.

Pendekatan ketiga, dan umumnya diadopsi oleh para Indonesianis, adalah pendekatan instrumentalis yang melihat bahwa proses demokrasi di Indonesia dibajak oleh oligarki politik (Van Klinken, 2009; Winters, 2011; Tyson, 2010). Bertolak dari asumsi yang memandang bahwa negara seharusnya menjadi lembaga yang efisien, berdasarkan meritokrasi, dan bersifat rasional, studi-studi ini memandang bahwa degradasi representasi disebabkan monopoli politik oleh segelintir kelompok elite. Argumen mengenai pembajakan politik meski di satu sisi menghidupkan perdebatan mengenai demokrasi, namun di saat yang bersamaan, menjadi jalan pragmatis untuk menjelaskan situasi politik yang timpang.

Hal ini tercermin dari rekomendasi-rekomendasi yang selama ini ditawarkan untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Ketiga pendekatan diatas cenderung mengadvokasi isu-isu seperti perbaikan sistem elektoral, pendidikan politik dan peningkatan integritas kepemimpinan untuk mencegah terjadinya monopoli politik oleh para oligarki (Aspinal dan Klinken).

Meski ketiga pendekatan diatas telah memberikan kontribusi yang signifikan di dalam memahami perkembangan demokrasi di Indonesia, mulai bermunculan studi-studi yang mengkritik pendekatan-pendekatan yang selama ini dominan digunakan di dalam isu demokrasi (Muhadi & Djalong, 2012). Salah satunya adalah pendekatan postkolonialisme yang mencermati bahwa terdapat bias orientalisme yang kuat di dalam studi-studi selama ini.

Sebagai contoh, pandangan bahwa krisis representasi disebabkan oleh oligarki politik merupakan efek dari cara pandang birokrasi ala Weberian yang mengasumsikan

bahwa birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang koheren, rasional, dan netral kepentingan. Padahal menurut Gupta di dalam *Subaltern Studies*, cara pandang tersebut mengabaikan karakteristik negara pascakolonial dimana negara lebih berperan sebagai arena kontestasi antar elite untuk mengakses kekuasaan dibandingkan sebagai mesin yang rasional (2010).

Dengan kata lain, asumsi bahwa terdapat faktor eksternal yang menghambat implementasi demokrasi hanya dapat dikonstruksi ketika ada konsep tunggal mengenai bentuk demokrasi yang ideal, yakni dalam konteks ini demokrasi ala Barat (Said, 2014). Implikasinya, problem demokrasi dianggap hanya terjadi di negara-negara berkembang dan Barat sebagai pusat peradaban adalah pihak yang paling kompeten untuk merumuskan jalan keluar dan selanjutnya menciptakan relasi ketergantungan.

Melalui ilustrasi diatas, studi ini hendak menunjukkan bahwa perlu ada pergeseran paradigma yang mengeksplorasi krisis demokrasi secara internal dibandingkan menuding faktor-faktor eksternal sebagai penghambat demokrasi. Selain contoh diatas, contoh keterbatasan pendekatan moralistik, institusionalis maupun instrumentalis adalah mengasumsikan bahwa demokrasi dan aktivisme politik hanya bekerja di dalam ruang politik formal seperti di dalam bilik suara hingga musrembang. Formulasi ini mengabaikan praktek politik sehari-hari (*everyday life of politics*) yang juga konstitutif di dalam membentuk wacana-wacana mengenai negara. Kedua, dan masih berkaitan dengan faktor utama, tantangan utama demokrasi dan representasi adalah mencari cara atau akses yang paling efektif untuk menghubungkan konstituen dengan elite tanpa memperhatikan proses marginalisasi yang selama ini bekerja dalam mendiskriminasi warga negara. Hal ini menimbulkan rasa skeptis apakah krisis representasi dapat diatasi hanya dengan memperketat regulasi penyelenggaraan demokrasi.

Studi ini tidak dimaksudkan untuk meragukan hasil proses pemilihan wakil rakyat yang mencerminkan aspirasi rakyat, seperti kemenangan Jokowi di dalam pemilihan presiden tahun lalu. Justru sebaliknya, studi ini hendak mempertanyakan kembali, bagaimana wacana representasi politik selama ini diproduksi? Apakah konsep representasi dapat dimaknai sebatas proses pemberian suara melalui voting? Siapa yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan batas representatif dan tidak representatif? Bertolak dari ketiga pendekatan populer diatas, studi ini hendak membongkar ilusi representasi dan juga sistem demokrasi liberal yang dipandang melanggengkan konsep representasi tersebut.

Upaya untuk membaca kembali konsep representasi sebagai suatu wacana yang tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan telah diinisiasi oleh beberapa penstudi postkolonial dan poststrukturalis (Spivak, 1988; Karatani, 2010). Salah satu karya yang paling berpengaruh yang membahas problem representasi adalah 'Can the subaltern speak?' (Spivak, 1988). Spivak menemukan bahwa terdapat kekerasan simbolik di dalam wacana representasi yang selama ini diproduksi oleh berbagai pihak. Sebagai contoh, di dalam merepresentasikan identitas kelompok subaltern di India, wacana Barat mencoba menggambarkan kelompok subaltern sebagai subyek yang

saat ini belum modern namun dapat menjadi modern melalui program pembangunan dan modernisasi. Sedangkan, rezim lokal berusaha mempertahankan tradisi dan praktek lokal sebagai identitas yang dapat merepresentasikan kelompok subaltern. Di tengah-tengah ketegangan tersebut akhirnya yang terjadi adalah penindasan terhadap kelompok subaltern (Spivak, 1996, hlm 13). Dengan kata lain, suara kelompok subaltern tidak pernah dapat terdengar karena terdapat berbagai lapisan wacana, mulai dari tingkat global hingga ke tingkat lokal, yang mencoba mendefinisikan dan memproduksi identitas kelompok subaltern.

Argumen lain yang membongkar ilusi representasi dilacak oleh Spivak di dalam karya Marx (1988, hlm 68). Bagi Marx, tindakan dan wacana kelompok yang merepresentasikan seringkali independen atau otonom dari kelompok yang direpresentasikan (Karatani, 2010, hlm 161). Namun, hal ini disebabkan bukan karena ada pembajakan oleh para elite, tetapi lebih disebabkan ada misrekognisi di dalam memahami identitas. Konsep kelas atau golongan yang selama ini digunakan untuk mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi suatu kelompok sosial atau *Darstellung* (to depict) seringkali diasumsikan telah memiliki kesadaran atau agensi kolektif dan dapat direpresentasikan atau *Vertretung* (to represent) (Karatani, 2010, hlm 145). Akibatnya, ada ilusi yang selama ini diproduksi yang meyakini bahwa persamaan posisi sosial, seperti kelas, dengan sendirinya akan menghasilkan agensi, kesadaran dan kepentingan kolektif (Spivak, hlm 72, 1988). Padahal dalam kondisi nyatanya, kelas lebih merupakan kelas yang tidak sadar akan keberadaan dirinya (*class unconsciousness*). Ini artinya, kesadaran kolektif hanya dapat menjadi eksis ketika terdapat gerakan yang berusaha membangun dan mendidik identitas bersama.

Analisa Spivak ini memiliki daya kritik yang kuat atas klaim representasi yang dilakukan oleh politisi, kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan elite-elite lainnya sebab meski di permukaan berbagai aktor tersebut terlihat sedang merepresentasikan pandangan yang berseberangan antara satu dengan yang lain. Di saat yang bersamaan elite-elite tersebut berbagi kerangka berpikir yang sama yakni menganggap ada kesadaran atau ideologi yang dapat mereka klaim dan representasikan tanpa pernah mempertanyakan bias ideologi di balik representasi tersebut (who votes who for whom). Lebih lanjut, tidak dipertanyakan juga ada tidaknya resistensi kelompok yang diwakili terhadap model representasi dominan (Konjin, 2005, hlm 145). Hal ini kemudian menimbulkan kecurigaan bahwa ada kepentingan untuk mendominasi atau menjaga status quo di balik setiap klaim representasi. Hal ini diperkuat dari substansi representasi yang selama ini dipromosikan cenderung menempatkan negara dan pasar sebagai pelaku perubahan, *producer of welfare/agent of change*. Sedangkan, masyarakat adalah penerima sasaran/obyek perubahan yang pasif, *consumers of welfare/object of intervention* (Harris, 2011 Carroll, 2010, Fergusson, 1994).

Untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai limitasi dari model representasi di dalam demokrasi liberal, studi ini akan fokus pada kelompok subaltern. Meski setiap kelompok rentan untuk disenyapkan atau tidak dapat berbicara dalam model representasi dominan, wacana kelompok tertindas atau subaltern adalah wacana yang

paling sering digunakan untuk membangun legitimasi elite atau kelompok yang merepresentasikan.

Dan oleh karena itu, kelompok subaltern adalah kelompok yang pertama kali mengalami dampak negatif dari limitasi proses representasi (Guha, 1983, hlm 6). Meski demikian, siapa yang dimaksud secara spesifik dengan kelompok subaltern sendiri merupakan konsep politik yang terus dikontestasikan. Di dalam studi ini, kelompok subaltern dipahami sebagai kelompok yang tidak hanya mengalami marginalisasi tetapi juga terus aktif membangun resistensi meski dalam skala kecil sekalipun (Chakrabarty, 2000). Singkat kata, studi ini fokus mengeksplorasi limitasi dari model representasi dominan terhadap kelompok subaltern. Kedua, studi ini membuka kemungkinan-kemungkinan adanya perlawanan kelompok subaltern terhadap model representasi dominan di luar bentuk formal. Bentuk resistensi dapat berupa artikulasi budaya, bahasa, dan ekonomi alternatif.

Bab II

Kontestasi Wacana Politik Representasi dan Demokrasi

2.1 Pengantar

Model demokrasi tidak dapat dipisahkan dari infrastruktur pengetahuan yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu wacana yang paling mengakar dalam studi-studi demokrasi di Indonesia dan dalam konteks global adalah wacana *third wave of democratization* yang memandang bahwa demokratisasi sebagai suatu pergerakan sejarah yang tidak terelakkan. Dengan kata lain, demokrasi dipandang sebagai sesuatu yang universal dan diinginkan oleh seluruh komponen masyarakat. Bertolak dari asumsi tersebut, maka studi-studi yang dibentuk oleh paradigma tersebut menekankan prosedur penyelenggaraan demokrasi dan kualitas demokrasi yang berkembang di Indonesia.

Di Indonesia, kerangka gelombang demokratisasi ini menjalin relasi mutual dengan pendekatan moralistik/institusionalis/strukturalis di atas yang berusaha mengeksplorasi faktor-faktor yang menghambat pendewasaan demokrasi di Indonesia. Kajian-kajian moralistik/institusionalis yang bertautan dengan kerangka gelombang demokratisasi umumnya menghasilkan studi-studi yang fokus pada komparasi kondisi sosio-politik negara-negara pasca otoritarian; investigasi proses penyelenggaraan demokrasi di Indonesia (Pratikno & Hanif, 2012; Pratikno, 2011); konstelasi politik lokal dan politik identitas pasca otonomi daerah. Topik-topik tersebut meski beragam, namun dalam problematisasinya cenderung mengasumsikan demokrasi sebagai suatu sistem yang bebas kepentingan, universal, dan terpisah dari struktur masyarakat.

Menggunakan pendekatan Marxist mengenai proses eksploitasi dan alienasi, perspektif Marxist mencoba merevisi pandangan di atas dengan mengklaim bahwa demokrasi diproduksi hanya untuk melayani kepentingan borjuis. Pandangan ini ditawarkan oleh Vilfred Parreto yang memandang bahwa di dalam setiap sistem demokrasi hanya 20% dari total populasi yang akan benar-benar menikmati kesejahteraan (1896). Louis Althusser, Sosiolog dari Prancis, lebih jauh mengungkapkan bahwa demokrasi kapitalisme adalah struktur kekuasaan yang mereproduksi ketimpangan kelas melalui aparatus ideologi negara dan aparatus represif negara (2014). Menggunakan pendekatan strukturalis, maka problem representasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari struktur kapitalisme yang hanya mengakomodasi kepentingan kapital (Hadiz, 2004, hlm 716).

Pada satu sisi, pendekatan strukturalis tidak terjebak pada pertanyaan naif seperti pendekatan instrumental di atas yang masih bertanya atau hendak membuktikan apakah hubungan representatif terbangun antara elite dengan warga negara. Pendekatan strukturalis bertolak dari posisi yang menggarisbawahi bahwa proses representasi tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan. Di sisi lain, pendekatan strukturalis masih memandang bahwa dimensi ekonomi atau perjuangan kelas sebagai kunci untuk mentransformasi struktur sosial yang timpang tanpa

mempertanyakan seberapa jauh konsep representasi sebenarnya menghasilkan emansipasi bagi kelompok subaltern.

2.2 Studi Demokrasi dan Hegemoni Pengetahuan Barat

Studi ini tidak akan memasuki perdebatan mengenai faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi demokrasi sebab pertanyaan-pertanyaan tersebut cenderung komplisit dengan logika orientalis yang menganggap bahwa problem atau keunikan demokrasi hanya terjadi di luar negara-negara Barat. Implikasinya, tidak hanya konsep demokrasi digunakan oleh Barat untuk mendefinisikan Indonesia, tetapi kemudian resep-resep untuk membangun sistem demokrasi yang ideal juga harus datang dari Barat.

Padahal, dalam kenyataannya, sistem demokrasi tengah mengalami krisis di berbagai negara (Laclau & Mouffe, 2010). Selaras dengan para penstudi yang menekankan aspek kritik ideologi, studi ini memandang bahwa kajian mengenai problem representasi dan demokrasi perlu ditempatkan dan dilihat sebagai bagian dari kontestasi produksi pengetahuan yang lebih luas. Hal ini dikemukakan oleh Muhadi & Djalong (2012) misalnya yang berpendapat bahwa kajian-kajian mengenai konflik di Indonesia cenderung menegasikan formasi sosio-historis suatu lokalitas dan mengabaikan bias Orientalis di dalam proses produksi pengetahuan sehingga akhirnya resolusi konflik seringkali tidak merespon kebutuhan nyata di lapangan.

Dalam studi-studi yang menggunakan logika berpikir demokrasi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan identitas Indonesia, demokrasi selalu dibayangkan sebagai suatu sistem makro yang utuh, total, eksternal dan bekerja dalam batas-batas teritori negara yang jelas. Turunan dari kerangka berpikir seperti ini kemudian adalah pertanyaan-pertanyaan kunci seperti sejauh mana kualitas demokrasi Indonesia berkembang? Faktor-faktor apa yang menghambat kemajuan demokrasi di Indonesia? Hasilnya adalah penjelasan seperti oligarki politik, korupsi dan seterusnya adalah penyebab mengapa demokrasi terhambat dan krisis representasi terjadi di Indonesia.

Di satu sisi pertanyaan tersebut membantu menjelaskan fenomena sosial politik di Indonesia, dominasi metodologi nasionalisme (Schiller, 2002) tersebut juga membawa efek negatif seolah-olah problem representasi dan demokrasi hanya terjadi di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Ide bahwa negara-negara Barat mungkin saja mengalami krisis representasi menjadi sesuatu yang hampir mustahil. Dan reproduksi bahwa krisis representasi hanya terjadi di negara-negara berkembang tercermin dari kebijakan-kebijakan lembaga internasional seperti Bank Dunia, AusAid, JICA dan Ford Foundation. Meskipun masing-masing lembaga berdiri secara independen, mereka dipersatukan oleh gagasan-gagasan yang serupa dalam memandang Indonesia yakni limitasi demokrasi hanya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia sehingga merupakan suatu kasus yang unik. Hal ini yang menyebabkan lahirnya resep-resep seperti peningkatan partisipasi, good governance, pemberdayaan, dan termasuk juga perbaikan representasi di seputar pembangunan dan demokrasi, yang sebenarnya merupakan pintu masuk bagi

SuperBlok Barat untuk mengenali suatu negara, mengidentifikasi kebutuhannya, dan merekomendasikan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan oleh negara berkembang (Nugroho, 2002).

Hampir tidak pernah ada situasi dimana formula-formula seperti good governance dan peningkatan partisipasi diadopsi negara-negara Barat. Ini artinya, demokrasi dan pembangunan yang diadvokasi oleh Bank Dunia dan aparatus ideologi liberal lainnya tidak hanya menjamin terjadinya pertumbuhan ekonomi dan menjamin stabilitas politik dalam suatu negara tetapi juga mereproduksi imajinasi bahwa krisis representasi dan problem demokrasi hanya terjadi di negara-negara yang masih prematur demokrasinya. Asumsi bahwa kemunduran demokrasi dan krisis representasi hanya terjadi di negara berkembang menjaga posisi negara-negara Barat untuk tetap berada di posisi dominan.

Ilustrasi konkrit bahwa pengetahuan berhubungan dengan kekuasaan dikemukakan oleh Jameson di dalam bukunya *Anti-Politics Machine* yang memandang bahwa program pembangunan, demokrasi dan keamanan yang diadvokasi oleh Bank Dunia sejatinya tidak membawa hasil apapun kecuali efek depolitisasi atau dalam bahasa Jameson *Anti-Politics*. Pada kasus yang berbeda, Ong memiliki pandangan yang lebih radikal dengan mengatakan bahwa hasil-hasil tersebut secara sengaja direayasa dan difasilitasi oleh negara melalui berbagai kegiatan untuk menciptakan individu yang memiliki jiwa enterprenaur, individual, dan produktif sehingga terus merawat dan menggerakkan sistem pasar.

Berdasarkan dua ilustrasi ini, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan berupaya mempertahankan kegiatan-kegiatan yang belum tentu memiliki manfaat bagi kelompok subaltern agar tetap menjadi boneka (*docile body*) yang selaras dengan logika pasar. Dan untuk melaksanakan peran tersebut, yang dibutuhkan oleh negara-negara berkembang adalah teknokrat yang dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan makro ekonomi sebagaimana yang telah diformulasikan oleh aktor-aktor internasional (Mkandawire, hlm 265, 2010). Dalam konseptualisasi liberal, wacana representasi direduksi menjadi sebatas instrumen yang dapat mendukung kebijakan-kebijakan yang berorientasi pasar dan liberalisasi ekonomi.

2.3 Kritik Ideologi Terhadap Wacana Politik Representasi dan Demokrasi

Kajian literatur sejauh ini telah memberikan ilustrasi yang sederhana mengenai perdebatan di dalam studi-studi demokrasi di Indonesia dan kaitannya dengan cara memahami problem representasi. Salah satu kritik yang diangkat oleh studi ini adalah kerangka yang selama ini dominan cenderung memosisikan problem representasi dan demokrasi sebagai cerminan dari belum sempurnanya atau bahkan anomali Indonesia di dalam berdemokrasi. Oligarki politik, tumpang tindih otoritas lembaga, atau lemahnya kepemimpinan dalam menampung aspirasi, seluruhnya bermuara pada kesimpulan bahwa demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik unik dan hingga derajat tertentu menghambat proses demokratisasi. Logika ini sangat rentan untuk dieksploitasi karena kemudian menganggap bahwa ada satu bentuk tunggal mengenai demokrasi yang ideal yakni model demokrasi negara-negara Barat.

Selanjutnya, di dalam arena global, posisi Indonesia umumnya diwarnai dengan relasi ketimpangan dan ketergantungan karena menganggap belum mampu mereplikasi model demokrasi liberal.

Untuk keluar dari jebakan kerangka liberal diatas, studi ini memandang penting untuk meneruskan dan mengembangkan tradisi kritik ideologi yang menempatkan krisis representasi di dalam konteks limitasi model demokrasi liberal itu sendiri. Dengan kata lain, problem representasi tidak lagi dilihat sebagai suatu anomali tetapi justru inheren di dalam sistem demokrasi yang mengadopsi nilai-nilai liberal (Nugroho, 2002; Nugroho, 2009a). Berdasarkan peta pemikiran politik representasi, ada setidaknya dua pendekatan berbeda yang sama-sama berupaya menunjukkan bahwa krisis representasi merupakan konsekuensi yang tidak terelakkan, yakni pendekatan post-kolonial dan post-Marxist. Meski sama-sama mengangkat tema representasi, kedua pendekatan bertolak dari pengalaman empiris dan formulasi masalah yang berbeda tetapi mengusung semangat yang sama.

2.3.1 Pendekatan Post-Kolonial: Krisis Representasi dan Marjinalisasi Suara Kelompok Subaltern

Seperti yang sudah di bab sebelumnya, di dalam pendekatan post-kolonial, pertanyaan mengenai proses representasi diawali oleh pengalaman historis kelompok subaltern di India. Di sini, yang dimaksud dengan kelompok subaltern adalah perempuan India yang berasal dari kasta rendah yang dituntut oleh tradisi untuk membakar diri jika pasangannya meninggal. Di dalam studinya, Spivak memandang bahwa pengetahuan mengenai praktek bunuh diri selalu direpresentasikan oleh dua wacana berbeda yang saling berkontestasi antara satu dengan yang lain.

Pertama adalah wacana Barat yang membaca bahwa praktek bunuh diri menggambarkan perempuan India sebagai subyek yang tertindas, tidak memiliki agensi dan korban dari budaya lokal. Di sisi lain, ada wacana lokal yang berusaha memberikan agensi kepada perempuan dengan berpendapat bahwa praktek bunuh diri oleh perempuan justru menunjukkan bahwa perempuan justru aktif berpartisipasi di dalam mempertahankan tradisi. Di tengah-tengah ketegangan dua wacana tersebut akhirnya yang terjadi adalah penindasan terhadap kelompok subaltern (Spivak, 1996, hlm 13). Spivak mempertanyakan bagaimana mungkin 'suara' kelompok marjinal dapat diartikulasikan dan diadvokasi tanpa memproblematisasi ketimpangan struktural yang selama ini mendominasi posisi kelompok subaltern.

Kondisi ini membuat Spivak berpendapat bahwa di balik praktek representasi terjadi suatu kekerasan simbolik sebab agensi dan suara kelompok subaltern diasumsikan seolah-olah nyata dan terbuka, yang kemudian dapat diakses dan diklaim oleh kelompok-kelompok representatif (kelompok masyarakat sipil, parlemen, eksekutif akademisi). Identitas seperti kelas, gender, usia, agama, etnis, ras, yang selama ini digunakan untuk mendeskripsikan karakter suatu kelompok sosial (Derstellen) tidak dengan serta merta akan menghasilkan kesadaran ideologis di dalam pemikiran subyek (Verstellen). Hanya karena seseorang menunjukkan ciri-ciri miskin, tidak berarti orang tersebut merasa miskin atau bahkan memiliki pengetahuan

mengenai konsep miskin. Oleh sebab itu, Spivak menyimpulkan bahwa pada akhirnya proses representasi merupakan rekayasa sosial untuk mengamankan posisi kelas dominan.

Kritikan-kritikan Spivak di atas dikembangkan lebih mendalam oleh kelompok *The Subaltern Studies Group* yang terdiri dari ilmuwan-ilmuwan dari Asia yang tertarik mengkaji masyarakat postkolonial dan postimperial. Meneruskan pertanyaan Spivak mengenai sejauh mana wacana dan pendekatan demokrasi mampu mengartikulasikan kepentingan kelompok subaltern, Ranajit Guha berpendapat bahwa wacana demokrasi sangat terbatas. Konsep-konsep seperti kelompok terdidik, konstituen, pemilih, bahkan warga negara (*citizen*) sekalipun yang selama ini digunakan untuk memberdayakan kelompok subaltern, menurut Guha merupakan manifestasi dari konsep masyarakat sipil yang diadopsi dari perkembangan sejarah Barat.

Di India, berbeda dengan di negara-negara Barat, hanya kelompok elite yang memiliki persamaan karakteristik dengan pengertian masyarakat sipil versi Barat. Sedangkan praktek-praktek sosial kelompok subaltern memiliki logika yang sepenuhnya berbeda dari logika masyarakat sipil. Hal ini yang menyebabkan wacana-wacana seperti modern/tradisional, politik/prapolitik, terdidik/terbelakang, dan seterusnya tidak akan pernah mampu menjangkau dan mencerminkan kepentingan kelompok subaltern. Guha sendiri kemudian mengajukan suatu pendekatan yang disebut '*political society*' untuk memahami agensi politik kelompok subaltern secara lebih mendalam.

Pandangan Spivak dan kelompok studi Subaltern di atas membawa kerangka berpikir baru di dalam memahami proses representasi. Teorisi-teorisi yang dihasilkan oleh penstudi post-kolonial menunjukkan bahwa marginalisasi suara kelompok subaltern bahkan sudah dimulai sejak tahap merepresentasikan kepentingan kelompok subaltern. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam sistem demokrasi yang paling ideal sekalipun, jika memang sistem yang ideal benar-benar eksis, suara kelompok subaltern akan terus dipinggirkan karena wacana-wacana yang digunakan untuk memberikan ruang artikulasi bagi kelompok subaltern tidak merefleksikan logika berpikir kelompok subaltern. Ini artinya, problem representasi tidak disebabkan oleh oligarki politik atau tumpang tindih otoritas institusi demokrasi tetapi justru dipicu oleh sistem demokrasi itu sendiri. Elemen-elemen eksternal yang selama ini dianggap '*membajak*' praktek representasi sebenarnya lebih merupakan efek yang timbul akibat keterbatasan-keterbatasan di dalam sistem demokrasi. Cara berpikir ini membawa implikasi serius karena mempertanyakan seluruh bangunan pengetahuan mengenai sistem demokrasi yang ideal. Bagaimana jika untuk melampaui problem representasi, kita perlu melangkah lebih jauh melampaui model demokrasi liberal saat ini?

Meski di satu sisi cara pandang post-kolonial dapat dianggap revolusioner, analisa Spivak mengenai krisis representasi juga menimbulkan beberapa persoalan. Salah satunya adalah pandangan fatalistik terhadap praktek representasi. Ada tendensi di dalam analisa Spivak untuk mengeneralisasi bahwa setiap proses representasi akan memarginalkan posisi kelompok subaltern. Hal ini menimbulkan problematika baru,

apakah seluruh proses representasi dapat digeneralisir sebagai suatu praktek marjinalisasi?

Bagi Spivak jawabannya adalah Ya, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali memobilisir kelompok subaltern agar mampu berbicara untuk dirinya sendiri dan juga ketimpangan struktural yang mengelilingi kelompok subaltern. Pandangan tersebut tidak hanya rentan terjebak di dalam proses esensialisasi dan generalisasi, tetapi di dalam praksisnya juga kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai artikulasi politik seperti apa yang kemudian dapat dibayangkan oleh kelompok subaltern? Apakah krisis representasi berarti kelompok subaltern tidak dapat membangun aliansi dengan kelompok-kelompok yang berada di luar dirinya di dalam melakukan resistensi? Kritik Spivak terhadap proses representasi menimbulkan pertanyaan krusial kemudian, seperti apa bentuk alternatif jika praktek representasi hanya akan membungkam suara kelompok subaltern?

2.3.2 Pendekatan Post-Marxist: Problem Representasi dan Hegemoni Demokrasi Liberal

Di dalam perkembangan kajian mengenai demokrasi, pendekatan post-kolonial sebagaimana yang diadvokasi oleh Spivak dan kelompok Subaltern Studies bukan satu-satunya paradigma yang fokus mengkritisi politik representasi. Post-Marxist yang mulai berkembang di era 70an juga menaruh perhatian serius terhadap isu representasi di dalam sistem demokrasi. Senada dengan pendekatan post-kolonial, pendekatan ini berpendapat bahwa problem representasi diproduksi oleh sistem demokrasi itu sendiri dan bukan disebabkan oleh pihak ketiga yang membajak, mengurangi, atau menghilangkan suara kelompok subaltern. Meski demikian, pendekatan post-Marxist tidak meyakini asumsi fatalistik, sebagaimana yang dipahami post-kolonial, yang memandang bahwa setiap proses representasi akan menghilangkan aspirasi atau agensi kelompok dan individu yang direpresentasikan. Bagi studi ini, problem representasi berkaitan dengan ideologi liberal yang hari ini membingkai sistem demokrasi di hampir seluruh negara di dunia. Ideologi neoliberalisme yang menekankan nilai-nilai kebebasan individu, kesetaraan universal (*all men are equal*), dan sistem hukum (*rule of law*) untuk melindungi kebebasan telah menghilangkan dimensi politikal di dalam kehidupan bermasyarakat.

Implikasinya, masyarakat tidak hanya terfragmentasi ke dalam kumpulan individu-individu, tetapi juga mulai melupakan aspek-aspek fundamental seperti makna kesetaraan itu sendiri, tujuan konsep perwakilan politik, dan antagonisme yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun identitas kolektif. Singkatnya, krisis representasi merupakan konsekuensi dari asumsi liberal yang berusaha menghapus keberadaan antagonisme dan berusaha membangun masyarakat yang ideal melalui proses komunikasi yang rasional antar individu, netral dari kekuasaan, dan nilai kesetaraan universal. Padahal, hilangnya antagonisme ternyata justru melemahkan identitas kolektif dan praktek representasi hingga akhirnya menjadi sesuatu yang tidak lagi signifikan.

Mengaitkan praktek representasi dengan hegemoni ideologi liberalisme mengindikasikan bahwa krisis representasi bukan merupakan suatu kondisi yang permanen sebagaimana yang diyakini oleh Spivak. Melihat keberadaan ideologi liberal dibalik krisis representasi ini penting untuk ditekankan sebab aspek tersebut seringkali diabaikan atau disepelkan oleh studi-studi yang selama ini berupaya mentransformasi sistem demokrasi. Alhasil, upaya untuk melakukan perbaikan cenderung terjebak di level prosedural. Hal ini tercermin dari bagaimana isu demokrasi selalu dikaitkan dengan lemahnya akuntabilitas dan komunikasi politik pasca pemilihan umum. Akibatnya, rekomendasi-rekomendasi yang kemudian ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan adalah menambah waktu reses bagi anggota parlemen agar dapat bertemu konstituennya atau antipati sepenuhnya terhadap model demokrasi dengan cara mengeksklusikan diri (Nugroho, 2009a).

Kedua rekomendasi tersebut, meskipun berada di kutub yang berseberangan, sama-sama mengandaikan bahwa politik hanya beroperasi di dalam ruang-ruang formal. Dengan kata lain, baik pendukung maupun penentang demokrasi liberal saat ini terjebak di dalam kerangka berpikir yang sama bahwa politik hanya bekerja melalui mekanisme formal. Kemungkinan-kemungkinan bahwa politik dan resistensi dapat bekerja di berbagai lapisan (*ubiquitos*) menjadi terabaikan.

Pendekatan post-Marxist merupakan salah satu alternatif untuk memperluas kajian mengenai limitasi demokrasi liberal sebab dalam konteks dunia hari ini semakin banyak gerakan-gerakan sosial yang mempertanyakan ideologi liberal. Di Amerika Latin, salah satu garda terdepan yang sedang membongkar logika demokrasi liberal adalah gerakan masyarakat adat (*indigenous movement*). Meredefinisikan gerakan masyarakat adat sebagai gerakan politik dan bukan gerakan budaya, gerakan-gerakan tersebut tengah mempertanyakan letak keadilan dari sistem neoliberalisme yang menegasikan unsur historitas, pluralisme dan kolektifitas dalam mengkonstruksi pihak yang berhak menjadi warga negara dan tidak (Yashar). Salah satu poin kunci di dalam membongkar hegemoni demokrasi liberal adalah kemampuan untuk menamakan diri sendiri secara otonom dan menuntut rekognisi atas identitas yang telah dikonstruksi tersebut. Dalam konteks ini artikulasi masyarakat adat lebih merupakan respon terhadap ketidakadilan dan bukan merupakan sesuatu yang primordial di dalam dunia modern.

Kemunculan-kemunculan praktek-praktek yang berupaya mengatasi keterbatasan demokrasi liberal membawa implikasi besar terhadap cara kita memahami demokrasi di Indonesia. Melalui perspektif baru ini, ada potensi untuk mencermati praktek seperti politik uang yang sering dianggap sebagai pemicu krisis representasi dan demokrasi dengan cara berbeda. Pandangan selama ini umumnya memandang politik uang sebagai hambatan sebab akhirnya hanya orang yang memiliki modal yang dapat terpilih dan mengeksklusi orang-orang yang sebenarnya kompeten untuk menjadi wakil rakyat (Nugroho, 2009b). Pandangan ini di satu sisi patut diapresiasi karena mencoba merumuskan permasalahan dan menawarkan jalan keluar, tetapi di sisi lain, rekomendasi-rekomendasi yang ditawarkan maksimal hanya dapat memberikan pemecahan secara parsial. Upaya untuk menggali ke tataran yang

lebih konseptual cenderung diabaikan, akibatnya pertanyaan-pertanyaan krusial seperti mengapa komunikasi politik melemah pasca pemilu? Mengapa orang menggunakan uang untuk meraih dukungan nyaris tidak pernah dikemukakan.

Padahal gambaran yang lebih menyeluruh hanya dapat dieksplorasi apabila ada pergerakan melampaui aspek-aspek teknis dan mulai mempertanyakan konsep dan logika model demokrasi itu sendiri. Sebagai contoh, asumsi bahwa semua orang setara (*all men are equal*) oleh karena itu memiliki hak *voting* sangat problematik karena mengabaikan fakta ketimpangan dan ketidakadilan sosial (Nugroho, 2009b). Bagaimana mungkin demokrasi dapat membawa kesejahteraan jika logikanya sendiri tidak mengakui atau bahkan menyinggung isu ketidakadilan? Kontradiktif dengan pandangan dominan selama ini, praktek-praktek seperti melemahnya interaksi pasca pemilu dan penggunaan uang untuk meraih dukungan merupakan efek dari limitasi demokrasi liberal yang mengabaikan dimensi ideologis (Nugroho, 2009a). Dengan kata lain, politik uang misalnya sangat mungkin dipahami sebagai upaya pragmatis untuk mengisi kekosongan dimensi ideologis yang diabaikan oleh sistem demokrasi liberal dan bukan dimotivasi oleh keinginan rakus segelintir oligarki politik (Nugroho, 2009a). Pergeseran paradigma seperti ini membawa implikasi besar sebab membuka kemungkinan-kemungkinan baru di dalam memahami elemen-elemen demokrasi.

Pendekatan post-kolonial dan post-Marxist di atas merupakan bagian dari pergerakan berupaya menunjukkan keterkaitan isu representasi dengan limitasi demokrasi liberal. Bertolak belakang dengan kerangka berpikir dominan yang selama ini memandang bahwa ada faktor-faktor eksternal yang menghambat implementasi demokrasi, kedua pendekatan di atas menunjukkan bahwa bentuk demokrasi hari ini yang banyak dipengaruhi oleh wacana liberal telah melanggengkan diskriminasi dan eksklusi. Implikasinya, krisis representasi perlu dipandang sebagai bagian dari limitasi demokrasi liberal dan bukan sebagai akibat kelalaian individu.

Paparan dua pendekatan di atas membawa implikasinya masing-masing. Jika dirumuskan dalam pertanyaan, lantas "apa implikasi-implikasi dari dua paradigm itu dalam upaya mencermati relasi negara dan masyarakat sipil?" Lebih jauh, "apa yang terjadi ketika subyek mulai mencermati krisis representasi sebagai bagaian dari limitasi demokrasi?" Untuk menjawabnya, paparan bab selanjutnya akan fokus pada dua pertanyaan tersebut dengan mengkaji pengalaman birokrasi, partai politik dan masyarakat sipil di Yogyakarta dalam melakukan praktik demokrasi dan pembangunan.

Kajian ini akan menelisik lebih lanjut pergulatan/gerakan dua komunitas warga di Yogyakarta dalam merebut ruang publik, common good, rekognisi, kesetaraan, dan keadilan bagi kehidupan mereka. Dua komunitas warga itu adalah "Komunitas Warga Berdaya" yang berupaya mereklaim ruang kota dan sumber air bersih yang terserobot oleh maraknya pembangunan hotel di sekitar wilayah Kampung Miliran, Kotamadya Yogyakarta, dan "Komunitas Warga Relokasi Mandiri" yang tetap bersikukuh menolak relokasi paska erupsi Merapi 2010, dan bergulat bersama dalam membangun pemukiman mereka secara mandiri di kawasan rawan bencana, Desa Glagah Harjo, Sleman, Yogyakarta.

2.4 Kesimpulan

Bab ini mencoba membangun argumen bahwa kajian mengenai problem representasi dan formasi demokrasi merupakan wacana yang terkait erat dengan relasi kekuasaan di dalam dunia pengetahuan. Kajian yang selama ini memandang bahwa hambatan demokrasi di Indonesia disebabkan oleh pihak-pihak yang merupakan anomali di dalam demokrasi dapat dimaknai sebagai upaya untuk mempertahankan pandangan bahwa demokrasi yang ideal adalah model demokrasi Barat yang diartikulasikan oleh partai politik dan konstitusi.

Kritik ideologi seperti yang dipopulerkan oleh pendekatan post-kolonial dan post-marxist merupakan upaya untuk mempertanyakan kembali apakah model demokrasi dan juga pengetahuan Barat sangat superior dan sempurna? Meski keduanya menghasilkan rumusan masalah dan kesimpulan yang berbeda, dengan meminjam semangat kedua pendekatan kritik ideologi tersebut akan membawa kemungkinan-kemungkinan baru bagi kelompok subaltern dan juga masa depan politik representasi di Indonesia.

Bab III

Politik ‘Lokalitas’ dan Kebuntuan Representasi Liberal

3.1 Pengantar

Pembahasan sejauh ini telah mengelaborasi krisis representasi dan limitasi demokrasi liberal melalui pendekatan kritik ideologi. Ada setidaknya dua perspektif berbeda yang dapat digunakan yakni perspektif post-kolonial dan post-Marxist meski idenya sama-sama berusaha membaca problem representasi sebagai yang tidak terelakkan dalam praktek demokrasi. Produksi pengetahuan alternatif membawa nuansa baru di dalam membaca kasus-kasus politik dan demokrasi. Di dalam dua bab berikut, studi ini akan fokus mengkaji isu representasi, resistensi, identitas, dan praktek demokrasi dengan mengangkat dua kasus relevan yakni Warga Berdaya untuk area urban Yogyakarta dan Relokasi Mandiri di area rural Yogyakarta.

Di dalam bab ini, pembahasan akan fokus mengidentifikasi persoalan politik representasi menggunakan pendekatan post-kolonial. Beberapa pertanyaan utama yang dieksplorasi dalam bab ini adalah apa yang melatarbelakangi praktek representasi dalam dua kasus di Yogyakarta? Apa saja perbedaan dan persamaan praktek representasi diantara kedua wilayah tersebut? Bagaimana hubungan praktek representasi tersebut berkaitan dengan pendalaman kesadaran mengenai hak dan kewargaan (citizenship)? Satu pertanyaan terakhir yang paling penting adalah apakah praktek representasi pada akhirnya hanya akan meminggirkan suara kelompok subaltern?

3.2 Yogyakarta Untuk Siapa? Klaim Warga Atas Yogyakarta

3.2.1 Pembangunan Versi Neoliberalisme: ‘Yogyakarta Sebagai Kota Pariwisata’

Dalam lima tahun terakhir, pembangunan di Yogyakarta mengalami perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan pembangunan periode sebelumnya. Hotel, pusat perbelanjaan, dan perumahan berpagar (gated communities) berkembang dengan sangat pesat. Beberapa studi seperti yang dilakukan oleh Widhyarto, dkk (2014) misalnya menemukan bahwa angka pertumbuhan perumahan berpagar yang tersebar di wilayah Sleman, Bantul, dan Kota meningkat sebesar tiga kali lipat berdasarkan hasil survei terhadap 672 perumahan.

Pesatnya perkembangan Mall, apartemen, hotel, dan perumahan berpagar, tidak hanya di Yogyakarta, tetapi juga di kota-kota besar lainnya di Indonesia, merupakan ilustrasi kecil dari gambaran yang lebih luas bagaimana seluruh kota di dunia tengah mengalami transformasi akibat sistem neoliberalisme. Neoliberalisme sebagai suatu sistem yang mengunggulkan pertukaran informasi dan modal (dan menekan pertukaran pengetahuan dan manusia) di tingkat global oleh beberapa penstudi kritis dipandang sebagai salah satu faktor kuat yang menyebabkan mengapa trend pembangunan di berbagai kota menuju pada satu arah yang sama (Harvey, Sassen, Massey). Dengan kata lain, hegemoni sistem neoliberalisme yang mengutamakan kepentingan modal dan informasi menyebabkan ‘pembangunan’ hari ini dimaknai dengan mendirikan Mall, perumahan berpagar dan hotel.

Di Yogyakarta, pembangunan berbagai hotel dan pusat perbelanjaan dijustifikasi oleh pemerintah daerah DIY dengan mencanangkan Yogyakarta sebagai 'Kota Pariwisata'. Melalui wacana pariwisata, Yogyakarta dikonstruksi sebagai suatu wilayah yang ekonominya ditopang oleh 'Turis' baik dari luar negeri maupun dalam negeri. 'Turis' tersebut dalam prakteknya dapat mengambil berbagai jenis bentuk, 'Turis budaya' yang datang ke Yogyakarta untuk mengeksplorasi budaya dan sejarah Yogyakarta, 'Turis pendidikan' yakni mahasiswa yang memiliki rencana untuk melanjutkan pendidikan ke tahap yang lebih tinggi, dan 'Turis bekerja' yakni perusahaan, instansi negara, LSM, yang datang ke Yogyakarta untuk melakukan lokakarya, simposium, seminar dan lain-lain. Kehadiran ketiga turis tersebut, khususnya 'Turis budaya' dan 'Turis bekerja' seringkali membuat pembangunan hotel, apartemen dan pusat perbelanjaan menjadi suatu proses yang 'normal' dan hampir tidak terelakkan.

Merespon fenomena dimana neoliberalisme semakin intrusif, semakin banyak studi-studi kritis mencoba memperluas wilayah kajiannya dengan menghubungkan pembangunan fisik dengan isu kekerasan simbolik, konflik, kesenjangan sosial, dan diskriminasi (Nugroho, 2006, Rodgers & O'Neill, 2013). Di Yogyakarta, salah satu kasus yang merefleksikan dilema dan kontestasi di dalam proses pembangunan adalah kasus pendirian Fave Hotel. Fave Hotel yang didirikan di pinggir jalan raya Kusumanegara merupakan satu dari sekian banyak hotel baru yang dibangun untuk menjaring turis yang datang ke Yogyakarta untuk wisata dan bekerja. Lokasinya yang dekat dengan area kota tua dan pusat perbelanjaan yakni Jalan Malioboro, Alun-alun dan Keraton membuat akses tempat ini strategis. Terlebih lagi, Jalan Malioboro saat ini telah padat terisi sehingga tidak ada lagi lahan yang tersisa untuk dikonversi.

3.2.2 'Warga Berdaya': Kritik Terhadap Komodifikasi Kota

Fave Hotel mulai menarik perhatian media massa dan warga Yogyakarta lebih luas ketika muncul aksi protes terhadap keberadaan Fave Hotel. Aksi protes dimana awalnya para ibu-ibu dan pemuda kecamatan Miliran menggunakan berbagai aksi teatral seperti 'mandi' menggunakan pasir perlahan-lahan berkembang menjadi aksi kolektif yang kemudian dikenal dengan nama '**Warga Berdaya**'. Berdasarkan hasil wawancara, gerakan 'Warga Berdaya' dibentuk untuk mengkritik pembangunan hotel Fave yang sejak didirikan membuat warga Miliran kesulitan untuk mengakses air. Menurut pengakuan para warga, meski dalam kondisi kemarau sekalipun, tidak pernah sebelumnya ada kasus dimana warga Miliran kesulitan mendapatkan air. Dalam konteks ini, 'air' menjadi titik simpul yang mengawali warga Miliran untuk bersatu dan membangun aksi kolektif bersama.

Meski krisis air memicu keresahan warga Miliran, situasi tersebut tidak serta merta memicu terciptanya gerakan 'Warga Berdaya'. Diantara perubahan lingkungan fisik dengan pembentukan gerakan 'Warga Berdaya' terdapat proses konstruksi identitas bersama dan mobilisasi politik yang terjadi secara bertahap di dalam komunitas warga Miliran. Konstruksi 'Warga Berdaya' tidak dapat dipisahkan dari peran salah satu warga lokal yakni Dodok Putra Bangsa (DPB) dimana keluarganya telah hidup di Miliran

selama hampir tiga generasi. Dari hasil wawancara, DPB menyampaikan bahwa pembangunan Fave Hotel sebetulnya bermasalah pada berbagai lapisan kebijakan. Jika dilihat dari sisi kebijakan, pembangunan Fave Hotel tidak selaras dengan konsep tata ruang dan wilayah yang pro kepentingan rakyat. Ditinjau dari sisi lingkungan, Fave Hotel menguras sumber daya air yang notabene merupakan barang publik dan seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan warga yang seluas-luasnya. Selain itu, dalam proses pendirian Fave Hotel, DPB mengakui bahwa pihak hotel hanya melakukan konsultasi dengan pengurus struktural dan dengan begitu mengabaikan prinsip-prinsip demokratis karena tidak melakukan dialog dengan warga Miliran yang lebih luas.

Kemampuan DPB (Dodok Putra Bangsa) untuk melakukan pemetaan dan analisa kritis diatas tidak dapat dipisahkan dari keterlibatannya selama ini dengan berbagai bentuk organisasi masyarakat sipil baik di tingkat lokal seperti "Anti-Sampah Visual", "Jogja Ora Didol", "Jogja Kangen KPK" hingga ke tingkat nasional seperti "Urban Poor Consortium". Keberadaan jaringan (network) yang luas, selain keterbukaan ruang publik, telah diidentifikasi sebagai salah satu elemen kunci di dalam memobilisir gerakan sosial atau mengadvokasi suatu isu sosial sebab berkontribusi bagi penguatan kapasitas aktor sosial dan juga menjadi modal sosial dalam melakukan resistensi (Diani).

Pertanyaan fundamental adalah mengapa Warga Miliran memilih nama 'Warga Berdaya' dalam mengartikulasikan protes? Apa kekuatan yang dimiliki oleh nama 'Warga Berdaya' sehingga mampu membangun kesadaran warga Miliran? Dari hasil wawancara, istilah 'Warga Berdaya' merupakan identitas yang dikonstruksi untuk menggambarkan adanya 'warga asli' atau 'penduduk lokal Yogyakarta' yang tetap memiliki 'agensi', 'otonomi' atau dengan kata lain 'berdaya'. Penekanan pada wacana 'asli', 'kedaerahan', 'lokal' yang 'berdaya' dan 'otonom' menjadi sentral karena di saat yang bersamaan ada hegemoni wacana 'pariwisata' yang dalam implementasinya hanya memperhatikan kesejahteraan 'pendatang', 'pembangunan', dan 'modal kapital'. Pandangan ini dipertegas oleh DPB yang mengatakan bahwa gaung gerakan 'Warga Berdaya' lebih diperhatikan oleh publik ketika DPB memperkenalkan dirinya sebagai warga asli Miliran dan bukan representasi lembaga masyarakat sipil.

Apakah marjinalisasi terhadap warga asli Yogyakarta yang dalam kasus ini menemukan titik kulminasi dalam pembangunan Fave Hotel merupakan satu-satunya faktor yang mendorong terbentuknya gerakan 'Warga Berdaya'? Berdasarkan hasil wawancara, absennya peran negara atau aktifnya 'kepasifan' negara merupakan faktor lain yang turut mendorong warga Miliran untuk mengambil sikap sendiri. Disini, makna kata 'Berdaya' bergeser menjadi sebuah kritik terhadap keberadaan negara yang dianggap mengabaikan kepentingan warga dengan memilih bersikap 'diam' dan Komplis dengan para pemilik kapital. Narasi demikian merupakan narasi dominan yang terus direproduksi hingga saat ini untuk menjelaskan perilaku negara dan praktek demokrasi pasca reformasi. Oleh karena sifatnya yang masif dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia akhirnya tercipta suatu kebenaran bahwa semua lembaga formal negara, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif, tidak ada yang merepresentasikan

aspirasi warga negara secara substansif. Fenomena ini kemudian melahirkan berbagai macam istilah bahwa Indonesia tengah mengalami 'defisit demokrasi', 'darurat demokrasi', dan lain-lain.

Warga Miliran juga memperkuat asumsi diatas dengan mengatakan bahwa lembaga-lembaga negara nyaris tidak berperan sama sekali baik dalam sosialisasi pembangunan hotel maupun memediasi warga dengan pihak hotel ketika ketegangan sosial semakin meningkat. Anggota legislatif lokal dan propinsi yang diharapkan dapat mewakili aspirasi daerah pemilihan Miliran tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lembaga eksekutif baik dinas maupun kecamatan meski menunjukkan perhatiannya kepada keresahan Warga Miliran namun tidak memperjuangkan kepentingan warga sebagaimana yang diharapkan. Pada akhirnya, meski Warga Miliran mampu memaksa Fave Hotel untuk menutup pipa air yang dipandang menghabiskan sumber mata air, pertanyaan utamanya adalah apakah Warga Berdaya mampu mengatasi krisis representasi yang dialami oleh warga negara? Disini pembahasan akan mulai mengeksplorasi isu representasi dengan menggunakan Fave Hotel sebagai ilustrasi.

3.2.3 Praktek Representasi dan Dilema Gerakan 'Warga Berdaya'

Pembahasan sejauh ini menunjukkan bahwa kelahiran gerakan 'Warga Berdaya' merupakan respon terhadap hegemoni pembangunan versi neoliberalisme di Yogyakarta dan absennya institusi-institusi negara dalam merepresentasikan aspirasi warga Miliran. Dalam konteks ini, artikulasi 'Warga Berdaya' berupaya untuk mengisi ruang kosong representasi yang ditinggalkan oleh lembaga-lembaga negara yang sebenarnya memiliki legitimasi untuk mewakili warga negara. Meski kemudian aksi 'Warga Berdaya' mampu menjadi corong advokasi, hasil studi juga menunjukkan bahwa gerakan 'Warga Berdaya' tidak terlepas dari tantangan-tantangan di dalam mengartikulasikan kepentingan warga Miliran.

Seperti yang telah dibahas di dalam studi literatur diatas, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat berkembang dalam mengimplementasikan sistem demokrasi telah dieksploitasi, baik secara sadar maupun tidak sadar, oleh bias orientalisme untuk mereproduksi asumsi bahwa ada problem keterbelakangan yang inheren di dalam struktur sosial masyarakat berkembang. Lalu apakah ada alternatif untuk menjelaskan hambatan di dalam berdemokrasi tanpa terjebak ke dalam logika orientalisme? Disini, studi-studi yang menggunakan pendekatan post-kolonial, salah satunya konsep 'Can the Subaltern Speak?' menjadi alternatif dengan membahas dilema yang terdapat di dalam penggunaan istilah kelas/gender/ras/golongan; apakah istilah kelas/gender/ras/golongan hanya berfungsi untuk mendeskripsikan dan mengkategorikan atau penanda bahwa istilah tersebut juga telah diinternalisasi dan menjadi bagian identitas subyek.

Dilema dibalik relasi antara subyek dengan kesadaran kelas tercermin ketika DPB berupaya mempertahankan klaim atau 'narasi' bahwa ide untuk membuat gerakan 'Warga Berdaya' merupakan hasil murni dari kesadaran warga Miliran, bebas dari kepentingan politik. Narasi ini menjadi goyah sebab disaat yang bersamaan DPB juga mengakui bahwa inisiasi gerakan 'Warga Berdaya' tidak dapat dipisahkan dari

proses dimana dirinya turut menerjemahkan keresahan Warga Miliran menjadi agenda 'Warga Berdaya'. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi DPB tidak hanya sebatas mengadvokasi gerakan 'Warga Berdaya' terbentuk, tetapi juga turut membentuk gerakan 'Warga Berdaya' dengan beberapa kalangan tertentu. Hal ini dipertegas dengan temuan bahwa sebelum membentuk aksi 'Warga Berdaya', DPB bersama dengan beberapa warga Miliran terlebih dahulu fokus mempersiapkan dan memenangkan calon yang kredibel di dalam proses pemilihan ketua RT 13 Miliran. Menurut DPB, tahap ini menjadi krusial sebab keluarnya ijin bagi Fave Hotel untuk memulai konstruksi, tidak dapat dipisahkan dari kepengurusan RT pada periode sebelumnya. Hanya setelah mengamankan birokrasi di tingkat lokal, ide mengenai protes terhadap Fave Hotel menjadi efektif dengan mengandalkan aktivisme dan perangkat birokrasi yang ada.

Paradoks antara gerakan 'Warga Berdaya' sebagai suatu praktek representasi dengan kesadaran mengenai redistribusi sumber daya semakin diperkuat jika berkaca pada situasi pasca tuntutan warga Miliran dipenuhi oleh Fave Hotel. Hampir tidak ada lagi aksi maupun pemberitaan yang meliput kondisi warga Miliran, padahal tidak ada jaminan bahwa setelah tuntutan warga terpenuhi, kondisi kesejahteraan warga Miliran menjadi lebih baik. Disaat yang bersamaan, pemberitaan mengenai 'Warga Berdaya' telah menaikkan popularitas tokoh gerakan 'Warga Berdaya' seperti DPB yang kemudian diundang ke dalam berbagai forum dan seminar untuk berbicara mengenai problem perkotaan sejak kasus Fave Hotel mencuat di media.

Teorisi Spivak mampu mengantarkan studi ini untuk memahami tantangan dan keterbatasan di dalam praktek representasi tanpa mereproduksi bias orientalisme; Akan selalu ada jarak antara suatu wacana, kesadaran, dan subyek yang membuat setiap praktek representasi rentan untuk dipertanyakan 'keasliannya'. Lebih jauh, argumen Spivak mampu memberikan warna baru di dalam memahami kerja politik representasi dengan memperlihatkan kompleksitas di balik konstruksi gerakan sosial dan mendorong proses advokasi untuk lebih peka dan kritis terhadap aktivismenya tersendiri. Ketika proses advokasi mengabaikan eksistensi dilema tersebut, bagi Spivak praktek advokasi tersebut sebenarnya sedang bekerja, baik sadar maupun tidak sadar, untuk kepentingan kelas penguasa atau elit dan meminggirkan kelompok marjinal. Dengan kata lain, ada tendensi bahwa suatu gerakan sosial yang sedang beroperasi memperjuangkan kepentingan kelompok marjinal, di saat yang bersamaan, justru menegaskan ketimpangan dan meminggirkan suara kelompok marjinal. Inilah paradoks dari suatu praktek representasi menurut Spivak dan ironinya konseptualisasi ini kemudian menghasilkan kesimpulan yang serupa dengan studi-studi dominan lainnya yakni suara kelompok marjinal tengah dikooptasi untuk kepentingan elite.

3.3 'Relokasi Mandiri' dalam Politik Bencana

Sejarah resistensi warga Merapi yang memilih relokasi mandiri relatif lebih panjang dibandingkan dengan gerakan 'Warga Berdaya' di wilayah Kotamadya Yogyakarta. Setiap kali Merapi Erupsi, kali itu pula konflik antara pemerintah dan penduduk lokal terulang. Erupsi tahun 2010 adalah serangkaian erupsi yang diawali

pada tanggal 26 Oktober 2010 hingga mencapai puncak letusan pada 5 November 2010. Erupsi kali ini tergolong erupsi besar setelah erupsi besar terakhir pada tahun 2006.

BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) mencatat letusan pada tanggal tersebut menyebabkan kerusakan dan kerugian besar di empat kabupaten yaitu Magelang, Boyolali, Klaten, dan Sleman. Ada korban jiwa sebanyak 386 dan paling tidak 399408 orang mengungsi pada puncak masa pengungsian (BNPB, 2010b). Tentu saja data tersebut tidak termasuk ribuan warga yang mengungsi secara mandiri ke rumah kerabat dan handai taulan. Besarnya dampak yang diakibatkan oleh erupsi yang terus terulang inilah yang mendorong pemerintah untuk melakukan upaya penanggulangan bencana dengan pendekatan pengurangan resiko bencana yang tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Indonesia.

Intervensi kebijakan pemerintah berlangsung intensif sejak masa mitigasi bencana (kesiapsiagaan), pada saat terjadinya bencana (proses evakuasi, pengungsian, penanganan warga di pengungsian), hingga paska bencana (warga kembali wilayahnya masing-masing, dan program pemulihan matapencaharian/livelihood). Dari sekian alternatif penanganan paska bencana ini adalah relokasi. Program inilah yang dalam sejarah erupsi merapi seringkali menjadi arena konflik antar warga masyarakat dengan pemerintah.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi membagi kawasan rawan bencana di merapi menjadi 3 bagian yaitu KRB I, II dan III (Slemankab, 2011). Dasar penetapan kawasan rawan bencana adalah sejarah aliran lahar yang terjadi sebelumnya, mengacu pada jarak luncuran lahar dan juga jarak antara sungai yang dilalui lahar dengan wilayah ancaman bencana. Dengan pertimbangan tersebut, terjadi hal yang unik di Gunung Merapi yaitu daerah yang dekat dengan puncak Merapi belum tentu menjadi wilayah yang paling beresiko (Combine, 2011)

Dari ketiga kawasan rawan bencana tersebut, KRB III adalah kawasan paling berbahaya yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat. Oleh karenanya, ia tidak boleh dihuni dan hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan ekonomi (pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya air, hutan, pertanian lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian, dan wisata alam). Implikasinya kemudian, warga Pedukuhan Pelemsari Desa Umbulharjo, Padukuhan Pengukrejo Desa Umbulharjo, Padukuhan Kaliadem Desa KEpuharjo, Padukuhan Petung Desa Kepuharjo, Padukuhan Jambu Desa Kepuharjo, Padukuhan Kopeng Desa Kepuharjo, Padukuhan Kalitengah Lor Desa Glagaharjo, Padukuhan Kalitengah Kidul Desa Glagaharjo, dan padukuhan Srunen Desa Glagaharjo harus pindah rumah/relokasi ke wilayah yang disediakan oleh pemerintah.

Dalam prakteknya, proses relokasi bukanlah hal yang mudah sebab dari hasil wawancara rumah bukan hanya sekedar bangunan fisik tempat berteduh dari hujan dan terik panas mentari. Rumah adalah ruang hidup, sosial dan ekonomi bagi pemiliknya. Berpindah tempat tinggal berarti berubah jarak dengan tempat mereka

mencari nafkah, berganti sebagian dari tetangga, juga kemungkinan berubah cara hidup sehari-hari (budaya). Menurut pemberitaan, hampir separuh dari warga yang seharusnya direlokasi menolak anjuran pemerintah ini dan tetap memilih tinggal di desanya. Dari 3.632 Kepala Keluarga yang harus direlokasi, hanya 2.556 KK yang bersedia, sedangkan yang menolak 1.076 KK. Angka terbesar disumbangkan oleh warga Desa Glagah Harjo yakni 384 (Poskotanews, 2012). Bahkan kepala desanya pun menolak untuk relokasi. Pilihan mereka ini yang kemudian sering disebut dengan 'Relokasi Mandiri'.

3.3.1 'Relokasi Mandiri': Ruang Sosial di Luar Juridikasi Kekuasaan Negara

'Relokasi Mandiri' adalah gerakan warga Glagah Harjo yang menolak untuk mengikuti program pemukiman kembali (resettlement) pemerintah dan tinggal di hunian tetap yang sudah disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa faktor determinan di dalam keputusan untuk bertahan di sekitar kawasan rawan bencana adalah faktor keamanan, keberlangsungan roda ekonomi warga, keberlanjutan sosial budaya dan pendidikan anak. Masing-masing faktor tersebut berpangkal pada wacana 'pengetahuan lokal' dimana masyarakat desa Glagahharjo mengklaim bahwa resiko erupsi telah menjadi bagian dari habitus kehidupan sehari-hari. Hal ini yang menyebabkan ada penolakan dari warga ketika dianggap sebagai pihak yang "mbalelo" (tidak patuh) terhadap pemerintah sebab ada kesadaran bahwa area pemukiman merupakan wilayah yang rawan bencana.

Keputusan warga Glagahharjo untuk relokasi telah membuat warga menjadi tereksklusi dari roda pemerintahan. Hal ini tercermin dari pengakuan warga yang mengakui bahwa listrik yang padam sejak erupsi merapi tidak kunjung diperbaiki dan bantuan pemulihan pasca erupsi juga hampir nyaris tidak pernah diterima. Menggunakan konsep Agamben mengenai 'state of exception', dapat diperdebatkan bahwa aksi 'Relokasi Mandiri' telah menggeser posisi warga Glagahharjo menjadi di luar arena kekuasaan negara. Berbeda dengan kasus Miliran dimana artikulasi 'lokal' ditujukan kepada pemilik modal yang melakukan pembangunan hotel, wacana lokalitas dalam kasus Glagahharjo telah menempatkan kebijakan negara sebagai pihak antagonis. Bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, pilihan warga bertentangan dengan keputusan pemerintah yang menetapkan kawasan rawan bencana sebagai area steril dari kehadiran manusia.

Menyikapi kebijakan negara yang mengabaikan kebutuhan warganya, masyarakat desa Glagahharjo kemudian berupaya menunjukkan dirinya adalah masyarakat yang mandiri. Aliran listrik dan air bersih yang semula sempat terputus mulai disambung lagi atas upaya swadaya warga dengan mengambil dan membayar sendiri aliran dari Klaten. Sementara untuk bantuan, muncul parodi-parodi yang memplesetkan istilah KRB dengan Kawasan Ranompo Bantuan (Kawasan Tidak Menerima Bantuan). Bahkan masyarakat secara mandiri juga menyiapkan fasilitas untuk membantu mereka jika bencana mengancam, yakni dengan membeli ambulans dan sebidang tanah yang akan digunakan jika ada erupsi yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk kembali.

3.3.2 Praktek Representasi: Strategi Mendisiplinkan Warga

Di dalam salah satu analisisnya mengenai relasi kekuasaan, Butler berpendapat bahwa kekuasaan tidak mengenal teritori. Hanya karena warga Glagaharjo saat ini telah dipandang 'mandiri' dan berada di luar arena negara, tidak berarti praktek kekuasaan kemudian berhenti beroperasi. Hal ini tercermin dari praktek representasi politik formal yang bekerja sehari-hari. Representasi yang idealnya merupakan proses mewakili kepentingan masyarakat mengalami pergeseran fungsi menjadi praktek yang berupaya 'mendisiplinkan' dan 'mengontrol' cara pandang warga Glagaharjo.

Di dalam proses dialog dengan pemerintah, warga tidak pernah mendapatkan respon yang memuaskan. Tidak hanya sebatas pihak pemerintah menggunakan pendekatan legal formal yakni peraturan bupati yang mengacu dari keputusan BNPB terkait kawasan rawan bencana yang menetapkan bahwa desa tersebut tidak boleh dihuni. Lebih jauh, momentum representasi dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan 're-edukasi' seperti sosialisasi resiko-resiko yang akan dihadapi jika tetap bertahan di kawasan rawan bencana dengan harapan warga kemudian akan bersedia direlokasi. Bagi salah satu politikus lokal, beban yang harus ditanggung sendiri oleh warga yang memilih untuk tetap tinggal adalah konsekuensi yang logis. Sedangkan bagi, aktivis WALHI, yang selama ini mendampingi warga Glagah Harjo, disini fenomena krisis representasi tampak jelas. Warga melalui proses demokrasi memilih pemimpin mereka yang dianggap bisa menjadi wakil mereka ketika ada persoalan, namun pada kasus Glagah Harjo masyarakat dilepas hanya karena mereka memiliki pandangan tersendiri mengenai apa yang disebut ancaman.

Disatu sisi, pemerintah mengkambinghitamkan bencana karena kemudian menyebabkan warga harus relokasi, namun disisi lain pemerintah juga menyalahkan masyarakat sebab menjadi warga yang tidak patuh. Hal ini mencerminkan bahwa bagi pemerintah, pertaruhan terbesar di dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi bukan dalam rangka mengamankan warga dari resiko bencana, melainkan memastikan otoritas dan kekuasaan lembaga tetap terjaga. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa keberadaan warga Glagaharjo mengganggu stabilitas kekuasaan ketika masyarakat desa lain bersedia untuk direlokasi. Sementara bagi warga Glagah Harjo melanjutkan hidup di hunian yang disediakan oleh pemerintah adalah ancaman yang paling nyata bagi mereka. Berdasarkan pengalaman lokal, beberapa warga melihat bahwa tetangganya yang memutuskan untuk direlokasi mulai menghadapi gejala sosial akibat tempat tinggal yang saling berhimpitan dan mata pencaharian yang tidak merata.

Posisi warga Glagaharjo yang tengah mengalami normalisasi dan sekaligus berada diluar arena kekuasaan negara menyebabkan perannya di dalam pembangunan menjadi sangat terbatas. Munculnya pembangunan penginapan di wilayah Cangkring yang sebenarnya bertentangan dengan regulasi pemerintah hampir tidak dapat dikontrol oleh masyarakat sipil yang dianggap telah 'keluar' dari sistem demokrasi. Situasi ini menunjukkan bagaimana batasan antara legal dan ilegal merupakan suatu konstruksi sosial yang tidak pernah baku dan menyesuaikan dengan kontestasi di antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan.

Pembahasan sejauh ini mengulas bagaimana pembangunan versi neoliberalisme di Yogyakarta melalui wacana 'pariwisata' telah menganakemaskan 'turis' yang dapat keluar masuk dengan mudah atau 'temporer', 'pendatang', 'kosmopolit' dan membawa kapital atau 'modal'. Hal ini tercermin dari pembangunan mal, hotel, apartemen, dan perumahan berpagar. Hal ini selanjutnya menghasilkan kesenjangan, rasa tidak aman dan ketidakadilan yang diekspresikan oleh gerakan 'Warga Berdaya' yang mengartikulasikan wacana 'asli', 'daerah', dan 'lokal Yogyakarta' untuk menyampaikan kritik sosial.

Selain itu, gerakan 'Warga Berdaya' terbentuk karena absennya negara dalam hal ini pemerintah daerah dalam melindungi kepentingan warga. Dalam konteks ini, gerakan warga berdaya dapat dipahami sebagai upaya warga untuk mengisi krisis representasi lembaga formal. Meski demikian, sebagai suatu aksi kolektif yang mengisi ruang demokratis yang kosong, gerakan Warga Berdaya selanjutnya juga menghadapi dilema dan problematikanya tersendiri.

Pembahasan sejauh ini menunjukkan bahwa aksi warga seperti 'Warga Berdaya' telah menciptakan peluang dan tantangan tersendiri. Meski sekarang kita mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai dinamika dan kompleksitas di dalam politik perkotaan di Yogyakarta, secara garis besar, kita masih terjebak pada satu pertanyaan besar, yakni dapatkah transformasi yang substantif, yang mengangkat dan memberdayakan suara kelompok marjinal terjadi?

Pertanyaan itu akan mengkerangkai pembahasan pada bab empat di bawah. Terlepas dari kekuatan dan kelemahan wacana lokalitas yang diangkat oleh warga Miliran, satu poin fundamental adalah diskursus 'lokal' berhasil merubah konstelasi kekuasaan aktor-aktor yang mewakili negara yakni birokrasi, legislasi, dan pengambil kebijakan. Melalui wacana 'lokalitas', gerakan 'Warga Berdaya' tersebut mampu mengartikulasikan 'deadlock' yang selama ini mereka hadapi dalam perumusan dan pengambilan kebijakan dan memperlihatkan kebuntuan praktek representasi institusi-institusi negara.

3.4 Kesimpulan

Bab ini berupaya memperlihatkan bagaimana gerakan sosial yang diinisiasi oleh masyarakat sipil tidak dapat dipisahkan dari fenomena krisis representasi lembaga-lembaga negara. Dua kasus di atas menemukan bahwa saat ini, salah satu wacana politik yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan warga negara adalah wacana 'lokal', yang dalam dua kasus diatas disebut 'Warga Berdaya' dan 'Resettlement Mandiri'. Wacana lokalitas sendiri mampu menjadi pusat gravitasi sebab pembangunan Yogyakarta hari ini tengah dikendalikan oleh sirkulasi kapital dan kekuasaan abstrak yang mengambil wajah 'turis' namun mampu mendorong pembangunan apartemen, hotel, dan kawasan rawan bencana.

Meski bertolak dari upaya untuk merevisi krisis representasi, studi ini menemukan bahwa gerakan-gerakan sosial pada prosesnya menghadapi dilema di dalam mengartikulasikan tuntutan politik. Salah satunya, wacana yang digunakan untuk mendeskripsikan proses marginalisasi kelompok subaltern tidak membawa

dampak langsung pemberdayaan dan literasi politik bagi warga secara keseluruhan. Fenomena ini yang kemudian oleh Spivak dirumuskan sebagai fakta bahwa berbagai jenis wacana yang saling berkontestasi dalam mengartikulasikan dan merepresentasikan kepentingan publik justru semakin meminggirkan kelompok subaltern. Dalam beberapa kasus, ini bahkan menciptakan 'minority within' kelompok subaltern itu sendiri, dimana suara perempuan dan anak-anak seringkali tidak terwakili dalam dialog publik.

Lebih jauh, kritik pendekatan post-kolonial terhadap praktek representasi secara tidak langsung juga memperkuat pandangan liberalisme selama ini bahwa tidak ada alternatif lain selain model representasi yang digunakan saat ini. Akibatnya, aspek prosedural, administrasi dan apolitis dalam politik representasi dan demokrasi di Indonesia dianggap sebagai suatu sangkar besi yang tidak menyediakan alternatif jalan keluar.

Bertolak dari situasi diatas, bab selanjutnya akan mengeksplorasi lebih jauh secara hubungan antara krisis representasi dengan sistem demokrasi liberal. Studi ini menemukan bahwa wacana lokalitas, 'warga berdaya', 'warga asli', penduduk 'Yogyakarta' terlepas dari segala keterbatasan yang ada, memiliki efek yang mampu menggeser posisi sosial lembaga-lembaga negara dan memperlihatkan bahwa dalam realitanya lembaga-lembaga negara tidak dapat diasumsikan mengabaikan kebutuhan warga negara. Hal ini membongkar kembali asumsi pemikiran liberal bahwa tidak ada alternatif praktek representasi selain yang diadopsi hari ini.

Bab IV

Krisis Representasi dan Hegemoni Demokrasi Liberal

4.1 Pengantar

Bab III telah menguraikan gerakan 'Warga Berdaya' di daerah Miliran dan gerakan 'Resettlement Mandiri' di area Merapi sebagai resistensi terhadap intervensi kebijakan pembangunan di masing-masing wilayah. Wacana seperti 'warga asli', 'penduduk lokal', 'warga Jogja', 'mandiri', 'berdaya', menjadi basis untuk menggalang dukungan melawan pemegang kapital dan otoritas kekuasaan dari pemerintah pusat sebagai antagonis masyarakat. Lebih jauh, kedua gerakan tersebut menjadi alat yang efektif untuk mengisi krisis representasi politik formal, baik di tingkat parlemen dan birokrasi, yang dipandang seringkali absen dalam kehidupan sehari-hari.

Meski kemudian gerakan sosial dalam prosesnya menemukan hambatan untuk meneruskan keberlanjutan gerakan, studi ini memandang bahwa kekuatan dari artikulasi identitas kedaerahan atau lokal tidak terbatas pada persoalan agensi masyarakat dan gerakan sosial. Aspek krusial lain yang diproduksi oleh dua aksi kolektif di atas adalah ia menyentuh persoalan artikulasi politik dan membuka cara baru untuk memahami krisis representasi formal dengan menunjukkan dilema dan kerentanan yang selama ini dialami oleh parlemen dan birokrasi dalam merepresentasikan aspirasi warga. Fenomena ini merupakan indikasi awal bahwa krisis representasi yang selama ini dipahami sebagai akibat dari oligarki politik, persoalan institusi, dan bahkan kemustahilan mewakili suara seseorang tidak dapat dipisahkan dari sistem demokrasi liberal yang membingkai praktek politik di Indonesia.

Pandangan ini krusial untuk dielaborasi lebih jauh pertama agar analisa sosial tidak terus menerus mereproduksi ide fatalistik bahwa pembajakan suara kelompok marginal oleh aktor-aktor yang berkepentingan merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Kedua, pandangan ini juga penting untuk dieksplorasi lebih jauh agar tidak ada kesan bahwa krisis representasi merupakan fenomena unik yang hanya terjadi di Yogyakarta atau Indonesia tetapi lebih merupakan dampak dari hegemoni neoliberalisme dalam praktek demokrasi.

4.2. Tantangan Praktek Representasi di Area Urban Yogyakarta

4.2.1 Pembatasan Otoritas Parlemen dan Pembangunan Neoliberalisme

Protes yang dilakukan oleh 'Warga Berdaya' terbukti kemudian mampu menarik perhatian lembaga parlemen dan eksekutif. Hal ini tercermin dari munculnya respon negara, melalui anggota parlemen, baik di media massa maupun dalam kegiatan-kegiatan publik yang mencoba mengklarifikasi opini yang selama ini umum berkembang di publik (sumber). Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota parlemen di level kota/kabupaten, studi ini menemukan bahwa bertolak belakang dengan pandangan dominan yang menganggap bahwa lembaga parlemen sengaja abai terhadap kebutuhan warga negara, anggota parlemen dalam prakteknya menghadapi tantangan atau keterbatasan untuk membendung pembangunan neoliberalisme.

Ada setidaknya tiga wacana yang umum diproduksi dan digunakan oleh anggota parlemen untuk menjelaskan tantangan yang mereka hadapi. Pertama, proses perumusan kebijakan dan regulasi tidak dapat melampaui atau melanggar regulasi yang memiliki otoritas lebih tinggi, dalam hal ini regulasi di tingkat provinsi dan pusat. Hal ini dipertegas oleh salah satu informan yang menyatakan misalnya, "Ada semacam atap yang tidak terlihat yang tidak dapat ditembus oleh kita"

Wacana kedua yang sering dipakai adalah tingginya rasa saling tidak percaya antara birokrasi dengan lembaga parlemen menyebabkan proses perumusan kebijakan yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan warga menjadi terhambat. Penjelasan ini meski di satu sisi menunjukkan sisi positif sebab mencerminkan kesadaran mengenai kolaborasi. Di sisi lain, dapat menjadi pintu pelarian yang membenarkan posisi lembaga parlemen ketika tidak mencapai ekspektasi.

Wacana ketiga dan yang paling dominan adalah keberadaan budaya lokal yang menghambat proses demokratisasi. Di sini, budaya lokal dijadikan alasan yang menyebabkan mengapa regulasi atau kebijakan yang progresif dan pro suara warga sulit untuk diimplementasikan. Hal ini disebabkan kebijakan atau regulasi progresif akan memicu kontestasi dan perdebatan yang di dalam budaya Jawa dipandang sebagai hal yang kurang pantas.

Meski ketiga wacana di atas diklaim oleh informan sebagai faktor penyebab yang menghambat kinerja parlemen, studi ini melihat bahwa ketiga wacana diatas juga merupakan cerminan dari hegemoni demokrasi versi neoliberalisme yang menuntut prinsip-prinsip proseduralisme, teknokratis, dan transparansi dalam proses perumusan kebijakan.

Hegemoni prinsip neoliberalisme menyebabkan artikulasi politik, yang sangat krusial bagi praktek demokrasi, menjadi terabaikan di dalam proses menjalankan peran sebagai figur representatif. Artikulasi politik yang dimaksud disini tidak sebatas menjaring aspirasi dari warga tetapi juga melakukan edukasi dan merumuskan identitas kolektif secara bersama-sama. Meminjam pemikiran Laclau, kekuatan politik ada di balik proses 'penamaan' atau konstruksi identitas sebab dalam momen tersebut, individu atau kelompok, mengambil suatu keputusan dari kompleksitas dan pilihan yang bervariasi. Pemilihan nama 'Warga Berdaya' dan 'Resettlement Mandiri' merupakan dalam studi ini merupakan ilustrasi sederhana dari proses artikulasi politik.

Salah satu petikan wawancara dibawah ini memperkuat argumen bahwa artikulasi politik belum dianggap sebagai proses yang krusial di dalam merepresentasikan aspirasi warga, "Saya tidak pernah melakukan kontrak politik ketika kampanye sehingga saya orang bebas pas kerja". Pandangan seperti ini selanjutnya menghasilkan mitos diantara anggota parlemen yang terpilih bahwa jumlah dukungan yang berhasil digalang membuktikan bahwa dirinya telah mengenali karakter dan kebutuhan warganya, padahal dalam kenyatannya, dukungan yang ia miliki sangat rentan untuk menghilang karena tidak memiliki basis kolektif yang kuat.

Absennya proses artikulasi politik tidak hanya terjadi di level mikro. Di level meso, partai juga mengalami krisis di dalam kemampuan memproduksi identitas

kolektif bersama. Hal ini tercermin dari fakta bagaimana kendaraan hanya menjadi kendaraan politik sehingga tanggung jawab untuk menggalang dukungan sepenuhnya berada di pundak calon anggota parlemen. Hal ini selanjutnya menyebabkan tidak ada proses pemantauan terhadap kualitas politik anggota parlemen sehingga hubungan antara anggota parlemen dengan pemilihnya cenderung personal dan menciptakan relasi patron-klien. Akibatnya, meminjam Nugroho, alih-alih merepresentasikan kepentingan rakyat (*speaking of*), mereka justru melakukan politik representasi terhadap kepentingan rakyat (*speaking for*) dalam rangka mengembalikan modal ekonomi yang telah diinvestasikan selama masa pemilu (Nugroho, 2009a).

Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan kesulitan bagi anggota parlemen untuk melihat fakta bahwa terdapat kesenjangan antara legitimasi politik yang diperoleh dari daerah pemilihan dengan cakupan tanggung jawab ketika sudah berada di dalam parlemen. Implikasinya, di satu sisi sebagai anggota parlemen memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan kota secara keseluruhan, tetapi sebagai politisi popularitasnya masih terbatas di seputar dapil sehingga menyulitkan warga dari luar dapilnya untuk komunikasi mengenai tata ruang kota dan juga menyulitkan anggota parlemen untuk menjaring aspirasi dari warga di luar dapilnya. Situasi ini menjadi semakin rumit jika ada persaingan di antara anggota parlemen yang kemudian saling menutup akses ke dapil masing-masing dan penempatan komisi tidak selalu selaras dengan latar belakang politik dan kompetensi anggota parlemen.

4.2.2 Birokrasi: Lembaga Representatif, Instansi Modernitas, atau Roda Kapitalisme?

Selain lembaga parlemen, pemerintah kota Yogyakarta yang dalam konteks ini diwakili oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) juga mempertegas pandangan bahwa problem representasi tidak dapat dipisahkan dengan sistem demokrasi yang lebih luas. Berdasarkan hasil wawancara, pihak BLH mengakui bahwa ada suatu kontradiksi yang dihadapi oleh pihak BLH yang kemudian mempengaruhi kinerja representasi politik. Kontradiksi tersebut dapat dibagi ke dalam tiga aspek, yakni aspek politik, teknokrasi, dan ekonomi.

Pada satu sisi, pihak BLH memiliki tanggung jawab politik kepada rakyat karena dipilih secara demokratis dan langsung. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu mewakili aspirasi masyarakat. Di sisi yang lain, BLH sebagai birokrasi yang rasional dan modern memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip Good Governance yang dalam prakteknya dimanifestasikan dengan menaati prosedur dan produk hukum di dalam proses merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan. Beban untuk menjadi birokrasi yang profesional semakin berat sebab prinsip Good Governance yang mengandaikan pemerintah bekerja seperti perusahaan swasta, yakni efisien dan terspesialisasi, justru menghasilkan sistem yang terfragmentasi antara satu instansi dengan instansi. Implikasinya kemudian adalah regulasi tata kota yang berlebihan dan tumpang tindih otoritas.

Berdasarkan hasil wawancara, BLH mengakui bahwa selama ini Warga Miliran telah mengajukan keluhan atas pembangunan Fave Hotel dan BLH berupaya memfasilitasi keluhan tersebut. Upaya untuk mencari jalan keluar namun menjadi terhambat sebab izin untuk mendirikan bangunan komersial merupakan otoritas dinas Perizinan dan bukan BLH. Tumpang tindih otoritas tersebut membuat BLH merasa berada di posisi yang kurang menguntungkan sebab bertanggung jawab untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang ditimbulkan oleh pihak lain seperti yang disampaikan oleh salah satu informan, "Persoalan yang dianggap merupakan tanggung jawab BLH sebenarnya merupakan ujung atau hilir dari suatu mata rantai permasalahan yang panjang"

Peran yang kontradiktif antara lembaga politik dan birokrasi modern mengakibatkan proses komodifikasi ruang oleh kapital menjadi hampir absen di dalam proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain, bagaimana investasi kapital telah mentransformasi lingkungan fisik dan struktur sosial masyarakat menjadi terabaikan. Akibatnya, konflik di Miliran yang sebenarnya timbul akibat perbenturan kapital dengan masyarakat menjadi kabur dan kemudian disalahpahami sebagai efek dari misinterpretasi atau terbatasnya pengetahuan warga lokal.

Hal ini yang menyebabkan mengapa cara yang dipilih untuk mengatasi konflik selanjutnya adalah solusi-solusi yang bersifat jangka pendek seperti sosialisasi regulasi, mempekerjakan warga Miliran di hotel, atau donasi alih-alih membangun dialog dengan seluruh stakeholders yang berkepentingan. Belum adanya upaya untuk memandang kasus Miliran sebagai cerminan dari permasalahan yang bersifat lebih jangka panjang seperti isu tata kelola wilayah yang berkeadilan membuat beberapa aparat pemerintah daerah merasa prihatin karena aspek ekologis dan sosial hampir tidak diperhatikan lagi.

4.3 Tantangan Praktek Representasi di Area Rural Yogyakarta

Pembahasan diatas berupaya memperlihatkan efek konsitutif artikulasi lokal terhadap posisi anggota parlemen dan birokrasi di wilayah perkotaan Yogyakarta. Studi ini menemukan salah satu efek krusial artikulasi lokal, dan selama ini cenderung terabaikan di dalam studi-studi praktek representasi dan demokrasi, adalah mengangkat narasi-narasi bahwa parlemen dan birokrasi hingga derajat tertentu turut 'tersandera' di dalam struktur birokrasi yang ada sehingga tidak mampu melaksanakan fungsi-fungsi politiknya secara komprehensif.

Sub bab ini hendak mengeksplorasi lebih jauh artikulasi yang dikonstruksi oleh aktor negara dalam merespon wacana 'Relokasi Mandiri'. Apa perbedaan dan persamaan dengan situasi 'Warga Berdaya? Apakah ada narasi mengenai dilema, limitasi, ambivalensi di dalam menyusun regulasi dan kebijakan pengelolaan resiko bencana?

4.3.1 Limitasi Legitimasi Parlemen Dalam Mengadvokasi Isu Bencana

Studi ini menemukan efek yang ditimbulkan oleh gerakan warga 'Relokasi Mandiri' berbeda dengan gerakan 'Warga Berdaya' di Miliran. Salah satu faktor

pembeda kuat terkait dengan posisi warga di dalam ruang kebijakan. Pada kasus 'Warga Berdaya', masyarakat mempertanyakan kembali fungsi dan makna kebijakan kota, seperti tata wilayah dan regulasi pembangunan, yang selama ini mengatur publik karena dianggap tidak melindungi kepentingan kelas bawah. Di dalam kasus 'Relokasi Mandiri' situasinya sedikit berbeda sebab aksi kolektif dibentuk oleh warga untuk 'keluar' dari ruang kebijakan yang disebut pengelolaan resiko bencana. Meskipun keduanya sama-sama memiliki makna kritik, implikasi dari strategi ini adalah warga 'dianggap' memilih untuk keluar dari batas-batas kekuasaan atau yang disebut oleh Agamben sebagai *'state of exception'*.

Di dalam konsepnya mengenai *"state of exception"*, Agamben berpendapat bahwa hanya karena sekelompok masyarakat kemudian hidup di luar batas negara serta kebijakan, tidak berarti kekuasaan berhenti bekerja. Justru sebaliknya, kekuasaan dan 'penindasan' dapat bekerja dengan sangat efisien karena sistem hukum formal tidak berlaku di luar batas negara. Agamben mengkonseptualisasikan hal ini untuk menjelaskan pengalaman hidup di kamp pengungsi dan penjara ekstrim dan meski kehidupan warga 'Resettlement Mandiri' tidak seberat kehidupan pengungsi, keputusan untuk 'keluar' dari keputusan mengenai kawasan rawan bencana membuat mereka kemudian dianggap sebagai 'disobedience' atau 'pembangkang'.

Di dalam praktek representasi politik, situasi ini kemudian menciptakan suatu situasi unik sebab berdasarkan hasil wawancara, anggota parlemen kemudian menunjukkan sikap ambivalensi terhadap warga 'Relokasi Mandiri'. Di satu sisi ada reproduksi stigma yang digunakan untuk menjelaskan aksi 'Relokasi Mandiri'. Di saat yang bersamaan, ada sikap 'pembiaran' terhadap kehidupan sehari-hari warga 'Relokasi Mandiri'. Stigma yang direproduksi, pertama adalah tuduhan mengenai peran tokoh-tokoh lokal seperti masyarakat sipil atau kepala desa karismatik yang mampu menarik dukungan warga lokal untuk menolak kebijakan pemerintah daerah.

Dalam konteks ini, anggota parlemen mengakui bahwa terdapat persaingan legitimasi dan popularitas dengan kekuatan-kekuatan sosial lain di tingkat lokal. Stigma kedua adalah kaburnya regulasi, kebijakan dan pendisiplinan terhadap warga yang menolak untuk taat terhadap kebijakan relokasi. Dalam hal ini, minimnya koordinasi antara lembaga legislatif kabupaten dengan lembaga legislatif dan eksekutif di level provinsi dan pusat serta aparat penegak hukum dipandang sebagai faktor yang membuka kesempatan bagi warga 'Relokasi Mandiri' untuk tidak mentaati regulasi.

Sikap ambivalensi anggota parlemen terhadap 'Relokasi Mandiri', antara sebagai *liyan* yang mengganggu ketertiban umum atau 'tetangga unik' yang memiliki cara tersendiri dalam mengelola kehidupan sehari-hari membuat anggota parlemen tidak terlalu terpengaruh dengan wacana 'lokalitas', 'tradisi', 'asli', yang diusung oleh 'Relokasi Mandiri'. Disini wacana 'lokalitas' tidak memiliki daya tarik sekuat kasus 'Warga Berdaya' sebab tidak ada antagonisme yang mengeksklusi atau mendiskriminasi warga lokal. Hal ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa tidak sedikit warga 'lokal' yang mau mengungsi dan pindah dari kawasan rawan bencana. Warga

yang bersedia direlokasi dipandang oleh anggota parlemen sebagai pihak yang lebih berpotensi untuk dijaring dukungan politiknya.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana anggota parlemen memandang praktek representasi dan kaitannya dengan warga 'Relokasi Mandiri'? Berdasarkan hasil proses pemilihan legislatif dan kepala daerah beberapa waktu yang lalu, mayoritas calon wakil rakyat cenderung mengabaikan desa Glagah Harjo. Ketika diklarifikasi, beberapa politisi mengakui bahwa hal ini dilakukan sebab persoalan relokasi di desa Glagah Harjo dianggap telah selesai. Meski tampak seperti proses 'pengabaian', beberapa anggota parlemen mengakui bahwa tuduhan 'pengabaian' tersebut tidak dapat dipisahkan dari keterbatasan modal dan pengetahuan untuk membangun identitas kolektif dan mengembangkan artikulasi politik. Hal ini yang menyebabkan pihak representatif yang seharusnya relatif otonom dalam merumuskan kebijakan, akhirnya menghabiskan waktu dan energi untuk mempertahankan pihak-pihak yang loyal mendukung dirinya alih-alih mengekspansi dukungan politik. Hal ini mengindikasikan bahwa berbeda dengan asumsi selama ini yang menganggap ada legitimasi kekuasaan yang kuat yang menubuh pada parlemen untuk mewakili aspirasi warga negara, ternyata pada prakteknya rentan dan dikelilingi oleh ketidakpastian (Foucault).

Keterbatasan artikulasi politik anggota parlemen tercermin dari kesulitan anggota parlemen memaknai agensi warga 'Relokasi Mandiri' atau kreatif mengeksplorasi identitas baru yang dapat digunakan untuk mengganti istilah 'Relokasi Mandiri'. Di satu sisi, warga diposisikan sebagai aktor yang memiliki agensi, kritis, otonom, dan memiliki kesadaran politik. Hal ini terungkap dari cara anggota parlemen yang memandang perannya hanya sebagai 'penerus' atau penyambung aspirasi masyarakat ke dalam negara. Di sisi lain, sebagai penerus suara rakyat, anggota parlemen tidak memandang bahwa ada peran edukasi dan proses 'penamaan' identitas warga yang seharusnya dijalankan oleh anggota parlemen karena merupakan kerja politik. Fenomena ini menunjukkan persamaan dengan kasus 'Warga Berdaya', dimana anggota parlemen menemui limitasi dalam merepresentasikan warga karena gagal mengenali pentingnya artikulasi politik dalam mewakili aspirasi warga.

4.3.2 Reproduksi Kearifan Lokal 'Sembada' Dan Laissez-Faire Birokrasi

Tidak hanya parlemen yang menghadapi tantangan dalam merespon dan merepresentasikan pandangan warga yang memilih untuk bertahan di kawasan rawan bencana atau "Resettlement Mandiri". Berdasarkan hasil wawancara dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), pada satu sisi BPBD memiliki kewajiban untuk menegakkan peraturan dan kebijakan yang sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut terkait dengan melindungi segenap warga negara dari potensi bencana yang dapat mengancam keberlangsungan hidup warga negara. Logika ini selanjutnya menghasilkan keputusan untuk merelokasi tempat tinggal warga Merapi yang tinggal di sekitar area rawan bencana. Ini artinya, warga yang telah tinggal selama bertahun-tahun dalam suatu wilayah harus pindah ke wilayah lain demi alasan keamanan.

Meski memiliki tujuan positif, kebijakan ini dalam prakteknya menghasilkan apa yang sudah disinggung oleh Spivak diatas sebagai krisis representasi. Hal ini disebabkan warga diposisikan sebagai aktor yang tidak berbicara untuk dirinya sendiri maupun memahami secara rasional arti keselamatan dan resiko. Oleh karena itu, tugas negara adalah menolong warga negara menggunakan konsep-konsep ilmiah dan rasional untuk melindungi warga negara tanpa pernah mempertanyakan seberapa jauh konsep-konsep tersebut sebenarnya memberdayakan atau merefleksikan aspirasi warga negara.

Di saat yang bersamaan, sebagai pemerintah daerah, legimitasi BPBD sebagai pusat kekuasaan juga tidak dapat dipisahkan dari relasi warga negara dengan keberadaan BPBD. Hal ini merupakan dampak dari desentralisasi dimana pemerintah daerah dipilih secara langsung dan dengan begitu merefleksikan aspirasi warga negara di daerah. Kebijakan pusat untuk menciptakan area steril penduduk menjadi problematik sebab tidak didukung oleh seluruh warga yang tinggal di area rawan bencana. Bagi sebagian warga, mata pencaharian mereka terkait erat dengan lingkungan sekitar tempat mereka tinggal. Kompensasi dan ganti rugi materi yang disediakan dari negara tidak seutuhnya menjamin bahwa masyarakat dapat memiliki kehidupan yang berkelanjutan seperti di pemukiman sebelumnya.

Dalam studinya mengenai kekuasaan, Foucault memandang bahwa kebijakan yang berusaha mengatur pola kehidupan populasi adalah manifestasi lain dari kekuasaan yang disebut *biopolitics*. Di sini, *biopolitics* selain bertujuan menopang sistem kekuasaan, direproduksi untuk menciptakan individu-individu yang taat terhadap sistem dan produktif BPBD seringkali menemukan dirinya berada pada posisi dilematis di antara warga negara dan pemerintah pusat atau dengan kata lain representasi politik atau mesin *biopolitics*. Situasi ini mendorong suatu proses identifikasi diri dimana BPBD memandang dirinya sebagai suatu lembaga yang dinamis karena harus mengelola relasi yang beragam. Lebih jauh, salah satu implikasi dari posisi *inbetween* tersebut selanjutnya adalah BPBD tidak memandang dirinya sebagai suatu lembaga yang statis dan terpisah dari masyarakat. Merespon aspirasi sebagian warga yang menghendaki untuk tetap tinggal di sekitar wilayah Merapi, BPBD memenuhi tuntutan warga yang hendak menetap di area rawan bencana.

Keputusan untuk memenuhi permintaan warga tersebut selain karena merupakan bagian dari fungsi normatif pemerintah yakni melayani kebutuhan warganya, lebih jauh juga merupakan bagian dari dinamika relasi kekuasaan yang lebih luas. Menggunakan istilah Jawa yakni *Sembada*, pemerintah memandang bahwa sebagai lembaga negara dan juga representasi kepentingan warga, ada batas-batas kekuasaan yang jika dilampaui akan menciptakan aksi yang sewenang-wenang alih-alih mengelola kekuasaan secara bijak. Dalam konteks ini, BPBD mengartikulasikan pandangan yang berseberangan dengan pemerintah pusat dan memandang bahwa kekuasaan negara menemui batasannya ketika berhadapan dengan fakta bahwa merelokasi warga tidak hanya berarti memindahkan secara fisik manusia dari tempat tinggalnya, tetapi juga memutus ikatan dan pengetahuan yang selama ini diproduksi antara manusia dengan alamnya atau dalam konseptualisasi Bourdieu '*habitus*'.

Dengan kata lain, melalui artikulasi sikap Sembada, BPBD mampu meredefinisikan makna representasi yang berbeda dengan pemerintah pusat hingga derajat tertentu karena merekognisi dan memberikan ruang bagi agensi warga negara.

Bertolak dari situasi tersebut, artikulasi sikap Sembada merupakan rekonseptualisasi makna representasi yang berupaya mengisi keterbatasan model representasi yang diadvokasi oleh demokrasi liberal. Dengan kata lain, artikulasi sikap Sembada perlu dipandang sebagai perlawanan hingga derajat tertentu terhadap sistem demokrasi yang sering dianggap tidak membawa efek positif bagi negara dan warga. Dalam prakteknya, sikap Sembada tercermin dari manuver-manuver yang dilakukan oleh BPBD dengan mengizinkan warga untuk tetap tinggal di area rawan bencana meski berseberangan dengan undang-undang.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus menyediakan prasarana dasar seperti listrik dan air dengan dalih untuk menyalakan sirene bencana. Jika listrik dan air disediakan secara khusus bagi warga, hal tersebut dapat menyulitkan posisi BPBD karena berbeda dengan kebijakan pusat yang menghendaki area rawan bencana steril dari kehidupan manusia. Di saat yang bersamaan, BPBD juga terus membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan dimana keinginan warga dapat berubah sewaktu-waktu dan memutuskan untuk melakukan relokasi atau *resettlement*. Di sini, BPBD memandang bahwa justru karena terdapat agensi pada warga negara, maka warga negara tidak dapat dipandang sebagai individu dan kelompok yang statis dan kaku.

Aspirasi warga negara merupakan sesuatu yang kontingen atau rentan berubah karena tidak dapat dipisahkan dari konteks yang lebih luas seperti mata pencaharian, dinamika relasi warga dan negara, keberadaan prasarana dasar, dan seterusnya. Pada akhirnya, BPBD juga memiliki harapan bahwa masyarakat juga dapat menjunjung nilai Sembada dalam berelasi sehingga dalam momen-momen dimana BPBD perlu mengatur masyarakat, hal ini tidak dipandang sebagai tindakan sewenang-wenang tetapi demi kepentingan kolektif.

Penting untuk ditekankan di sini bahwa artikulasi sikap Sembada tidak dapat dipisahkan dari konteks lebih besar yakni limitasi demokrasi liberal. Dalam konteks ini, terputusnya hubungan antara keputusan pemerintah pusat dengan aspirasi warga negara di tingkat lokal merupakan salah satu manifestasi dari limitasi demokrasi liberal yang sudah berhasil diidentifikasi. Selain konflik kebijakan, salah satu turunan dari limitasi demokrasi liberal yang memiliki efek konstitutif dalam membentuk artikulasi sikap Sembada adalah terhambatnya proses representasi di dalam ruang legislatif yang idealnya merupakan arena yang menghubungkan antara kepentingan warga negara dengan proses perumusan kebijakan. Akibatnya, BPBD dihadapkan pada porsi kekuasaan yang sebenarnya melampaui ukuran lembaganya sendiri yang dalam beberapa momen diakui menyulitkan kinerja lembaga.

Dalam momen-momen pertemuan antara anggota BPBD dengan anggota parlemen baik secara formal maupun informal, relasi timpang tersebut tercermin dari sikap anggota parlemen yang cenderung meminta nasehat dan rekomendasi dari anggota BPBD mengenai isu-isu yang dapat ditawarkan kepada konstituennya. Praktek

ini bertolak belakang dengan bayangan ideal demokrasi dimana birokrasi seharusnya bersinergi dengan lembaga parlemen dalam mengimplementasikan garis-garis kebijakan.

Dalam konteks hubungan antar lembaga, artikulasi sikap "sembada" menjadi krusial karena merupakan kritik terhadap tata kelola kelembagaan yang diproduksi oleh demokrasi liberal. Proses representasi yang seharusnya dilaksanakan oleh anggota parlemen tidak berjalan sebagaimana semestinya sehingga mengakibatkan kekuasaan yang begitu besar akhirnya terpusat pada satu lembaga yakni birokrasi. Untuk mencegah terjadinya tindakan yang sewenang-wenang, prinsip sembada akhirnya tidak cukup dengan hanya dijunjung tinggi oleh birokrasi tetapi akhirnya juga dilembagakan yang tercermin dari semboyan pemerintah daerah Sleman yakni "Sleman Sembada".

Poin penting dari pengalaman BPBD di atas adalah representasi menjadi suatu relasi yang dinamis dan tidak baku. Menggunakan konsep Sembada, BPBD di satu sisi tidak hendak menyederhanakan atau menyeragamkan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Merapi ke dalam satu model tunggal mengingat identitas merupakan sesuatu yang kontigen. Di saat yang bersamaan, BPBD juga memiliki harapan bahwa masyarakat juga bersikap bijak dan "sembada" dalam aksinya agar dalam momen-momen dimana BPBD perlu mengatur masyarakat situasi itu tidak dipandang sebagai tindakan sewenang-wenang tetapi demi kepentingan kolektif.

4.4 Kesimpulan

Kajian atas dua aksi kolektif di atas menunjukkan bahwa adanya persoalan artikulasi politik dan tantangan baru bagi dua aksi kolektif tersebut untuk membuka cara baru dalam memahami krisis representasi formal. Kedua aksi kolektif terbentur pada dilema dan kerentanan parlemen dan birokrasi dalam merepresentasikan aspirasi warga. Hal itu mengindikasikan adanya krisis dalam sistem demokrasi liberal yang membingkai praktek politik di Indonesia.

Dalam aksi kolektif di kawasan urban, krisis representasi muncul dalam tiga wacana berikut: *pertama*, proses perumusan kebijakan dan regulasi tidak dapat melampaui atau melanggar regulasi yang memiliki otoritas jenjang struktural yang lebih tinggi (regulasi pemerintah tingkat kotamadya, provinsi, dan pusat). *Kedua*, tingginya rasa saling tidak percaya antara birokrasi dengan lembaga parlemen menyebabkan proses perumusan kebijakan yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan warga menjadi terhambat. Sedangkan wacana *ketiga*, keberadaan budaya lokal dituding sebagai faktor penghambat bagi proses demokratisasi. Dalam paham ini, budaya lokal dijadikan alasan penyebab mengapa regulasi atau kebijakan yang progresif dan pro suara warga sulit untuk diimplementasikan.

Sedangkan aksi kolektif di kawasan rural, keterbatasan artikulasi politik anggota parlemen dan birokrasi pemerintah (BPBD) tercermin dari kesulitan/ketidakpastian sikap mereka dalam memaknai agensi atau mengeksplorasi identitas baru warga 'Relokasi Mandiri'. Di satu sisi, warga diposisikan sebagai aktor yang memiliki agensi, kritis, otonom, dan memiliki kesadaran politik. Di sisi lain, anggota parlemen dan

birokrasi pemerintah tidak memandang bahwa ada peran edukasi dan proses 'penamaan' identitas warga yang seharusnya dijalankan oleh anggota parlemen dalam kerja-kerja politik. Kondisi itu menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan yang kuat dan menubuh pada parlemen sebagai wakil aspirasi warga dan birokrasi sebagai pelayan warga negara, ternyata dalam prakteknya rentan dan dikepung ketidakpastian.

Dari kedua kasus tersebut, kajian ini mendapati temuan bahwa krisis representasi berlangsung dan terjadi pada berbagai arena, lapis, ragam, dan bentuknya yang multifaset dengan limitasi masing-masing. Namun ada persamaan dari keduanya yaitu bahwa krisis representasi itu terjadi hegemoni demokrasi versi neoliberalisme yang menuntut prinsip-prinsip proseduralisme, teknokratis, dan transparansi dalam proses perumusan kebijakan.

BAB V

Kesimpulan

Transformasi pembangunan di Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir telah mengundang berbagai pemangku kepentingan, akademisi, media massa, aktivis dan tentunya kelompok masyarakat untuk merefleksikan, mendiskusikan dan menyuarakan pandangan masing-masing mengenai Yogyakarta. Ditandai oleh pembangunan hotel, apartemen dan pusat perbelanjaan yang masif, Yogyakarta dipandang tengah dilanda oleh privatisasi yang berkedok pembangunan dan kesejahteraan. Dan untuk memahami secara mendalam proses yang memfasilitasi komersialisasi di Yogyakarta, studi ini menggunakan pendekatan kritik ideologi dengan mengangkat isu krisis representasi politik.

Mencermati hubungan antara isu krisis representasi dengan pembangunan di Yogyakarta merupakan bagian dari perdebatan besar di dalam literatur-literatur sosial pasca orde baru yang menempatkan isu representasi sebagai *epicentrum* di dalam memahami demokrasi dan pembangunan di Indonesia (Magnis-Suseno, 2009; Scholdt & Klinken, 2009; Metzner, dan Tomsa, 2014). Studi ini mencermati bahwa terdapat setidaknya tiga pendekatan yang selama ini mendominasi perdebatan mengenai krisis representasi dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Pendekatan integritas/moralistik yang menekankan karakteristik-karakteristik personal atau behaviorisme pemimpin. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan institusionalis yang melihat bahwa krisis representasi tidak dapat dipisahkan dari mekanisme yang mengatur relasi otoritas lembaga-lembaga negara (Mainwaring, 1990 dalam Aspinal, Metzner, dan Tomsa, 2014, hlm 7). Dan pendekatan ketiga, dan umumnya diadopsi oleh para Indonesianis, adalah pendekatan instrumentalis yang melihat bahwa proses demokrasi di Indonesia dibajak oleh oligarki politik (Van Klinken, 2009; Winters, 2011; Tyson, 2010).

Ketiga pendekatan diatas meski ideal di satu sisi, di sisi lain mengabaikan kompleksitas negara pascakolonial dimana negara lebih berperan sebagai arena kontestasi antar elite untuk mengakses kekuasaan dibandingkan sebagai mesin yang rasional (2010). Lebih jauh, Bagi Marx, tindakan dan wacana kelompok yang merepresentasikan seringkali independen atau otonom dari kelompok yang direpresentasikan (Karatani, 2010, hlm 161). Namun, hal ini disebabkan bukan karena ada pembajakan oleh para elite, tetapi lebih disebabkan ada misrekognisi di dalam memahami identitas. Isu representasi seringkali mengaburkan makna antara konsep *Darstellung* (to depict) dengan konsep *Vertretung* (to represent) yang menandakan kesadaran atau agensi kolektif dan dapat direpresentasikan atau (Karatani, 2010, hlm 145). *Implikasinya, ada ilusi yang selama ini diproduksi yang meyakini bahwa*

persamaan posisi sosial, seperti kelas, dengan sendirinya akan menghasilkan agensi, kesadaran dan kepentingan kolektif (Spivak, hlm 72, 1988).

Analisa Spivak ini memiliki daya kritik yang kuat atas klaim representasi yang dilakukan oleh politisi, kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan elite-elite lainnya sebab meski di permukaan berbagai aktor tersebut terlihat sedang merepresentasikan pandangan yang berseberangan antara satu dengan yang lain. Di saat yang bersamaan elite-elite tersebut berbagi kerangka berpikir yang sama yakni menganggap ada kesadaran atau ideologi yang dapat mereka klaim dan representasikan tanpa pernah mempertanyakan bias ideologi di balik representasi tersebut (*who votes who for whom*). Lebih lanjut, tidak dipertanyakan juga ada tidaknya resistensi kelompok yang diwakili terhadap model representasi dominan (Konjin, 2005, hlm 145).

Hal ini kemudian menimbulkan kecurigaan bahwa ada kepentingan untuk mendominasi atau menjaga status quo di balik setiap klaim representasi. Hal ini diperkuat dari substansi representasi yang selama ini dipromosikan cenderung menempatkan negara dan pasar sebagai pelaku perubahan, *producer of welfare/agent of change*. Sedangkan, masyarakat adalah penerima sasaran/obyek perubahan yang pasif, *consumers of welfare/object of intervention* (Harris, 2011 Carroll, 2010, Fergusson, 1994).

Bagi studi ini, problem representasi tersebut berkaitan dengan ideologi liberal yang saat ini menghegemoni wacana demokrasi di level global. Ideologi neoliberalisme yang menekankan nilai-nilai kebebasan individu, kesetaraan universal (*all men are equal*), dan sistem hukum (*rule of law*) untuk melindungi kebebasan telah menghilangkan dimensi politikal di dalam kehidupan bermasyarakat. Implikasinya, masyarakat tidak hanya terfragmentasi ke dalam kumpulan individu-individu, tetapi juga mulai melupakan aspek-aspek fundamental seperti makna kesetaraan itu sendiri, tujuan konsep perwakilan politik, dan antagonisme yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun identitas kolektif (Nugroho, 2009a; Nugroho, 2009b).

Singkatnya, krisis representasi merupakan konsekuensi dari asumsi liberal yang berusaha menghapus keberadaan antagonisme dan berusaha membangun masyarakat yang ideal melalui proses komunikasi yang rasional antar individu, netral dari kekuasaan, dan nilai kesetaraan universal. Padahal, hilangnya antagonisme ternyata justru melemahkan identitas kolektif dan praktek representasi hingga akhirnya menjadi sesuatu yang tidak lagi signifikan. []

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, Edward. Marcus Mietzner, Dirk Tomsa, The Yudhoyono Presidency: Indonesia's Decade of Stability and Stagnation, Institute of Southeast Asian Studies, 2014
- Carroll, Toby. 2010. *Delusion of Development: The World Bank and the Post Washington Consensus in Southeast Asia*. London: Palgrave Macmillan
- Chakrabarty, Dipesh. *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*, Princeton University Press, 2000.
- Ferguson, James. 1994. *The Anti-Politics Maschine: Development, Depoliticization and Bureaucratic Power in Lesotho*. New York: Cambridge University Press
- Gellert, Paul. 2015. Optimism and Education: The New Ideology of Development in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, Vol 45(3), hlm 371-393
- Glick Schiller, N, "A global perspective on transnational migration: theorizing migration without methodological nationalism" in Baubock, R. And Faist, T (edt) *Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 109-29.
- Guha, R. *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*, Durha: Duke University Press. 1983.
- Gupta, A. 2012. *Red Tape: Bureaucracy, Sturctural Violence, and Poverty in India*, Durham: Duke University Press
- Hadiz, Verdi, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*, Stanford University Press, 2010
- Harris, John. 2011. *Depoliticising Development: The World Bank and Social Capital*. New Dehli: Leftword Books
- Harvey, David, *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution*, Verso Books, 2012
- Karatani, Kojin. 2005. *Transcritique on Kant and Marx*. USA: MIT Press
- Laclau, Ernesto & Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*, Verso: 2010.
- Massey, Doreen, *For Space*, Sage: 2005.
- Nugroho, H. 2002. *Terpaan Demokrasi Global dan Pasang Surut Demokratisasi di Indonesia: Sebuah Kata Pengantar dalam John Markoff, Gelombang Demokrasi Dunia Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*, Yogyakarta: CCSS & Pustaka Pelajar.
- Nugroho, H. 2006. *Partisipasi, Kohesi Sosial, Resolusi Konflik, Pengalaman Wamena Papua*, Jakarta: CSIS.
- Nugroho, H. 2009a. *Menerobos Lingkaran Involusi Politik Indonesia, Refleksi Pilpres 2009 dalam Analisis CSIS Vol. 38, No. 3 September 2009*
- Nugroho, H. 2009b. *Demokrasi Protektif, Kesejahteraan Sosial & Kebijakan Pendidikan yang Memihak Rakyat dalam Forum Mangunwijaya III, Negara Minus Nurani: Esai-Esai Kritis Kebijakan Publik*, Jakarta: Kompas.

- Rodgers, Dennis & O'Neill, Bruce 2013, Infrastructural Violence: Introduction to the special issue. *Ethnography* 13(4): 401-412.
- Said, Edward, *Orientalism*, Knopf Doubleday Publishing, 2014
- Sassen, Saskia *The Global City: New York, London, Tokyo*, Princeton University Press, 2013
- Spivak, Gayatri. 1988. Can Subaltern Speak?' dalam C. Nelson dan L. Grossberg (editor), *Marxism and Interpretation of Culture*. Chicago: University of Illinois Press
- Spivak, Gayatri. 1996. *The Spivak Reader*. London: Routledge
- Sugiono, M & Djalong, F. 2012. Paths to Peace: Contending Discourse on Communal Violence and Conflict in the Post-New Order Indonesia, *PCD*, Vol (4), pp. 81-112
- Suseno, Magnis. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Tyson, Adam. 2010. *Decentralization and Adat Revivalism in Indonesia*. London: Routledge
- Van Klinken (editor), Scholdt. 2009. *Renegotiating Boundries: Local Politics in Post Soeharto Indonesia*. Leiden: KITLV
- Van Klinken, G., (edt: E. Aspinall) *The State and Illegality in Indonesia*, Brill, 2010
- Winters, Jeffrey. 2011. *Oligarchy*. New York: Cambridge University Press